



**TELITI INTERAKSI MONETER DAN FISKAL TERHADAP
GONCANGAN OUTPUT DAN INFLASI DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

ADE SEPTYA ROSA
1515210081

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak kebijakan moneter dan kebijakan fiskal terhadap kondisi inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kajian dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif dan data empiris tahun 2001 – 2017. Pelaksanaan kebijakan moneter melalui menstabilkan jumlah uang beredar dan pengendalian suku bunga mampu mengendalikan inflasi. pengendalian suku bunga akan mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi, namun pengendalian jumlah uang beredar akan berdampak terhadap menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Upaya mencapai stabilitas harga disertai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi memerlukan upaya antara kebijakan moneter yang terkendali, pengendalian aspek eksternal melalui stabilitas suku bunga dan peningkatana efektifitas kebijakan fiskal melalui peningkatan produktifitas dan penurunan tingkat kebocoran belanja pemerintah . model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model simultan dengan two stage last square (TSLS). Berdasarkan hasil analisis data diketahui untuk persamaan satu bahwa suku bunga, jumlah uang beredar dan kurs berpengaruh positif dan elastis terhadap inflasi, sedangkan investasi dan pdb berpengaruh negative dan elastis terhadap inflasi. Sedangkan untuk persamaan dua bahwa pengeluaran pemerintah dan investasi berpengaruh positif dan in elastis terhadap PDB, sedangkan penerimaan pajak dan inflasi berpengaruh negative dan in elastis terhadap PDB.

Kata kunci: Kebijakan Moneter, Kebijakan Fiskal, Inflasi, dan Pertumbuhan Ekonomi

ABSTRACT

This research to determine the impact of monetary policy and fiscal on the condition of inflation and economic growth in Indonesia. The study was conducted using descriptive analysis and empirical data in 2001-2017. The implementation of monetary policy through stabilizing the amount of money supply and control of interest rate is capable of inflation. Control of interest rates will encourage economic growth, but controlling the amount of money circulating will have an impact on declining economic growth rates. The effort to achieve price stabilization accompanied by high levels of economic growth requires an integrative effort between controlled monetary policy, control of external aspects through the stabilization of interest rates and increased effectiveness Fiscal policy through increased productivity and decreased government spending leakage rates. The models in this study used simultaneous models with two stage least square (TSLS). Based on the results of the analysis of the data is known for the equality of one that interest rates, the amount of money supply and the exchange rate positively and elastic influence on inflation, while the investment and GDP affect negative and elastic against inflation. As for the similarities of two that government expenditure and investments influence positive and in elastic against GDP, while the tax receipts and inflation affect negative and in elastic to GDP.

Keywords: Monetary Policy, Fiscal Policy, Inflation, Economic Growth.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
LEMBARAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	13
C. Batasan Masalah	13
D. Rumusan Masalah	14
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
F. Keaslian Penelitian	15

BAB II TINJUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori	16
1. Kebijakan Moneter	16
a. Pelaksanaan Kebijakan Moneter di Indonesia.....	17
b. Transmisi Kebijakan Moneter	19
2. Kebijakan Fiskal	23
a. Orientasi Kebijakan Fiskal	24
b. Fungsi Kebijakan Fiskal	25

c. Instrumen Kebijakan Fiskal.....	26
3. Output dan Inflasi di Indonesia	29
a. PDB	29
b. Inflasi.....	30
4. Interaksi Moneter dan Fiskal Terhadap Guncangan Output dan Inflasi di Indonesia	32
a. Pengaruh Tingkat Suku Bunga Terhadap Inflasi	35
b. Pengaruh Jumlah Uang Beredar Terhadap Inflasi	35
c. Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap PDB	38
d. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDB	40
B. Penelitian Terdahulu	42
C. Kerangka Konseptual	48
D. Hipotesis	50

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian.....	51
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	52
C. Definisi Operasional Variabel	52
D. Jenis dan Sumber Data	53
E. Teknik Pengumpulan Data	53
F. Teknik Analisis Data	53
1. Simultan Regression	53
a. Identifikasi Simultanis	56
b. Uji Kesesuaian (<i>Test Goodness of Fit</i>).....	59
c. Uji Penyimpangan Asumsi Klasik	59

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	62
1. Melihat Prospek Stabilitas Perekonomian Di Indonesia	62
2. Perkembangan Variabel Penelitian	67
a. Fluktuasi Inflation	67
b. Progress Product Domestic Bruto	68

c. Fluktuasi Interest Rate.....	71
d. Fluktuasi Money Supply	72
e. Progress Tax	74
f. Fluktuasi Government	76
g. Fluktuasi Kurs	78
h. Progress Investment	80
3. Hasil Uji Metode Simultan.....	82
a. Uji Asumsi Klasik	82
b. Regresi Simultan	84
B. Pembahasan	95
1. Analisis Simultasi SBI, JUB, KURS, INV dan PDB terhadap INF	95
2. Analisis Simultasi TAX, GOV, INV dan INF terhadap PDB ..	100

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	104
B. Saran	105

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Inflasi di Indonesia	5
Tabel 1.2 Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia	6
Tabel 1.3 Tingkat Suku Bunga dan Jumlah Uang Beredar	8
Tabel 1.4 Penerimaan Pajak dan Pengeluaran Pemerintah	10
Tabel 2.1 Review Penelitian Terdahulu	42
Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian	52
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel	52
Tabel 3.3 Uji identifikasi Persamaan	58
Tabel 4.1 Perkembangan Inflasi Tahun 2001-2017	67
Tabel 4.2 Perkembangan PDB Tahun 2001-2017.....	69
Tabel 4.3 Perkembangan Suku Bunga Tahun 2001-2017	71
Tabel 4.4 Perkembangan JUB Tahun 2001-2017	73
Tabel 4.5 Perkembangan Pajak Tahun 2001-2017	74
Tabel 4.6 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Tahun 2001-2017	76
Tabel 4.7 Perkembangan Nilai Tukar Tahun 2001-2017.....	78
Tabel 4.8 Perkembangan investasi 2001-2017.....	80
Tabel 4.9 Uji Normalitas Data	82
Tabel 4.10 Uji <i>Residual Tests for Autocorrelations</i>	83
Tabel 4.11 Hasil Estimasi Persamaan 1 TSLS	84
Tabel 4.12 Hasil Estimasi Persamaan 2 TSLS	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perkembangan Inflasi di Indonesia	5
Gambar 1.2 Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia	7
Gambar 1.3 Tingkat Suku Bunga dan Jumlah Uang Beredar	8
Gambar 1.4 Penerimaan Pajak dan Pengeluaran Pemerintah	10
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	48
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Simultan.....	49
Gambar 4.1 Perkembangan Inflasi Tahun 2001-2017	68
Gambar 4.2 Perkembangan PDB Tahun 2001-2017.....	70
Gambar 4.3 Perkembangan Suku Bunga Tahun 2001-2017	72
Gambar 4.4 Perkembangan JUB Tahun 2001-2017	73
Gambar 4.5 Perkembangan Pajak Tahun 2001-2017.....	75
Gambar 4.6 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Tahun 2001-2017.....	77
Gambar 4.7 Perkembangan Nilai Tukar Tahun 2001-2017	79
Gambar 4.8 Perkembangan Investasi Tahun 2001-2017	81

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kepada Allah SWT, karena atas Rahmat Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Teliti Interaksi Moneter Dan Fiskal Terhadap Goncangan Output Dan Inflasi Di Indonesia**

Selama proses penyusunan skripsi ini, Penulis mendapat bimbingan, arahan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi
2. Ibu Dr. Surya Nita, S.H, M. Hum. selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Bapak Bakhtiar Efendi, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Pembangunan Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Ibu Ade Novalina, SE.,M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberi arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Bakhtiar Efendi, SE.,M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan mengenai ketentuan penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan rapi dan sistematis.
6. Yang tercinta kedua orang tua saya yakni Ayahanda dan Ibunda yang telah banyak mendoakan dan memberikan motivasi serta bantuan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Kepada seluruh keluargaku yaitu Kakakku Novi Novara Sandy, Abangku Kasanovan, Ibukku Susiani , Om Dedek Darmadi dan masih banyak lagi yang belum saya sebutkan. Terima kasih atas dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.
8. Kepada seluruh sahabat-sahabatku Saor Menanti Dolok Saribu, Yuni Sahara, Nisa Lesina Surbakti, Erika Puspita, Arini Eka Ramadhani, Karin Fatmawati dan masih banyak lagi yang belum saya sebutkan. Terima kasih atas dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Penulis mengharapkan masukan dan saran dari para pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca. Terimakasih.

Medan, Oktober 2019

Penulis

Ade Septya Rosa
1515210081

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menghadapi suatu guncangan ekonomi pada tahun 1998 yang mengakibatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang menurun drastis, yaitu krisis moneter yang melanda ternyata sempat menghancurkan perekonomian Indonesia. Dalam keadaan ini, pemerintah dituntut melaksanakan berbagai reformasi, khususnya dibidang ekonomi yang memungkinkan terjadinya perubahan kerangka hukum dan kelembagan untuk menjalankan kebijakan moneter dan untuk mengamankan sistem keuangan Indonesi.

Perekonomian yang stabil akan lebih disukai dibandingkan dengan perekonomian yang mengalami gejolak dan goncangan. Kestabilan perekonomian suatu negara sangat didambakan oleh semua elemen pendukung perekonomian negara tersebut. Perekonomian yang stabil dapat menekan laju inflasi dan menyeimbangkan peredaran jumlah dimasyarakat. Selain itu, perekonomian yang stabil dapat mendukung kinerja dan produktifitas usaha dan bisnis sehingga menciptakan lapangan kerja baru dan dapat menekan tingkat pengangguran yang terjadi. Salah satu parameter yang dapat mengukur kestabilan perekonomian yakni dengan melihat kinerja dari stabilitas makro ekonomi diantaranya suku bunga, jumlah uang beredar, inflasi, nilai tukar, dan pengangguran.

Hera Susanti, M. Ikhsan dan Widyanti (2000) menyatakan bahwa inflasi yang tinggi akan dapat menyebabkan memburuknya distribusi pendapatan yang artinya juga menambah angka kemiskinan, mengurangi tabungan domestic yang merupakan

sumber investasi negara berkembang, menyebabkan defisit neraca perdagangan, menggelembungkan besaran utang luar negeri serta menimbulkan ketidakstabilan politik. Dapat dilihat begitu sangat besar dampak dari inflasi terhadap perekonomian di Indonesia sehingga inflasi dapat dikatakan salah satu variabel yang sangat berpengaruh terhadap fluktuasi perekonomian di Indonesia. Perekonomian yang berkembang pesat akan meningkatkan pendapatan dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran melebihi kemampuan yang akan menimbulkan inflasi. Inflasi yang tinggi akan berpengaruh buruk terhadap kinerja perekonomian di Indonesia (Sukirno, 2006). Menurut Sutawijaya (2012) tingkat inflasi yang tinggi dapat berdampak negatif pada perekonomian yang selanjutnya dapat mengganggu kestabilan sosial dan politik.

Goncangan yang terjadi pada perekonomian global, dapat mempengaruhi kondisi perekonomian nasional. Untuk mengurangi dampak goncangan perekonomian global terhadap perekonomian dalam negeri, dibutuhkan kebijakan yang efektif dan efisien baik kebijakan moneter ataupun kebijakan fiskal diikuti dengan berbagai kebijakan ekonomi lainnya. Fokus penerapan kebijakan moneter di Indonesia sesuai dengan UU No. 23 Tahun 1999 yang kemudian telah diubah dalam UU No. 3 Tahun 2004 mengenai kebijakan moneter, disebutkan bahwa bank Indonesia diberi amanah sebagai otoritas moneter ganda yang dapat menjalankan kebijakan moneter konvensional maupun syariah, maka kebijakan moneter yang ditempuh menggunakan dual monetary policy yakni konvensional dan syariah dengan tujuan utama kebijakan moneter di Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, yaitu kestabilan harga (inflasi) dan nilai tukar rupiah.

Upaya untuk menstabilkan perekonomian suatu negara dapat dicapai baik melalui kebijakan fiskal ataupun kebijakan moneter. Kebijakan fiskal dilaksanakan oleh pemerintah dengan menggunakan instrument pajak dan pengeluaran pemerintah. Sedangkan kebijakan moneter dilaksanakan oleh Bank Indonesia (BI). Setiap arah kebijakan tentunya diharapkan dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri, tapi tentunya membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk menuju pengaruh yang positif. Bank Indonesia merupakan lembaga otoritas moneter yang melakukan stabilisasi melalui instrument suku bunga, dimana penetapan suku bunga dilakukan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Salah satu variabel dari tolak ukur kemajuan suatu negara adalah pertumbuhan perekonomian. Jika perekonomian suatu negara stabil maka dapat dikatakan sebagai negara maju, sebaliknya jika keadaan perekonomian suatu negara terpuruk maka negara tersebut belum dikatakan sebagai negara maju. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi maka kegiatan dalam perekonomian suatu negara harus meningkat setiap tahunnya. (Mankiw, 2003).

Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal memiliki peran utama dalam mempertahankan stabilitas makroekonomi di negara berkembang. Namun, dua kebijakan tersebut menjadi perdebatan diantara kaum Keynesian dan Moneteris. Moneteris berpendapat bahwa inflasi merupakan fenomena moneter. Artinya, inflasi timbul sebagai akibat penambahan jumlah uang beredar, sedangkan menurut keynesian, inflasi disebabkan oleh pengeluaran agregat yang melebihi penerimaan agregat sehingga terjadi defisit anggaran dimana defisit anggaran tersebut mendorong bank sentral untuk meningkatkan jumlah uang beredar (Nopirin, 1996).

Menurut Ajisafe dan Folorunsho tahun 2002, kedua kebijakan tersebut menunjukkan keberhasilan dengan memberikan pengaruh yang besar terhadap kegiatan ekonomi di beberapa negara (lihat Abata dkk., 2012).

Para pengatur kebijakan, dalam keadaan ini bank sentral, memandang stabilisasi ekonomi sebagai salah satu tanggung jawab utama. Dan bagi para ekonom, masalah kebijakan pemerintah yang aktif adalah jelas dan sederhana perannya dalam menstabilkan perekonomian. Resesi merupakan periode pengangguran tinggi, pendapatan rendah, dan peningkatan tekanan ekonomi. Model permintaan dan penawaran agregat menunjukkan bagaimana guncangan dalam perekonomian bisa menimbulkan resesi. Model tersebut juga menunjukkan bagaimana kebijakan moneter dan fiskal bisa mencegah resesi dengan menanggapi guncangan tersebut.

Namun, ekonom lain bersifat kritis terhadap usaha dari pemerintah dalam menstabilkan perekonomian. Mereka berpendapat bahwa pemerintah seharusnya melakukan tindakan pendakatan lepas tangan terhadap kebijakan makro ekonomi. Pada awalnya, pandangan ini tampak mengejutkan jika model menunjukkan bagaimana mencegah dan menurunkan tekanan resesi, mengapa para kritikus ini meminta pemerintah tidak menggunakan kebijakan fiskal dan moneter untuk stabilisasi ekonomi. Pendapat para ekonom tersebut antara lain akibat dari lambannya implementasi dan kebijakan serta sulitnya melakukan peramalan ekonomi (Mankiw, 2003).

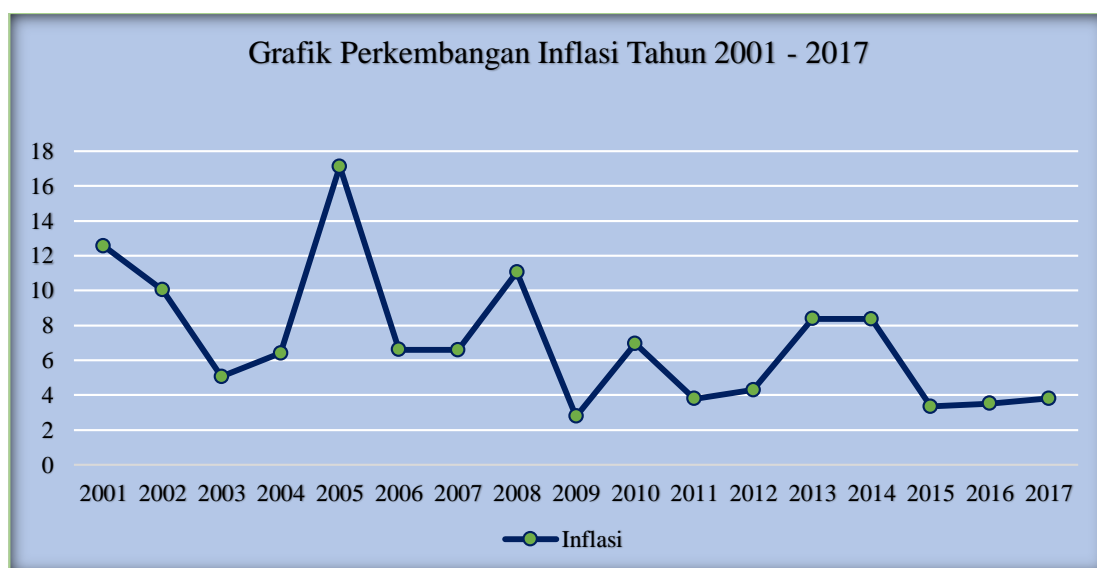
Adapun fenomena masalah dalam penelitian ini dapat dilihat dari data variabel penelitian yang dituangkan dalam bentuk tabel dan grafik sehingga akan terlihat

pergerakan data tiap variabel dan menemukan fenomena permasalahan sebagai berikut.

Tabel 1.1 Data Perkembangan Inflasi Pada Tahun 2001 s/d 2017

No	Tahun	Inflasi (%)
1	2001	12.55
2	2002	10.03
3	2003	5.06
4	2004	6.40
5	2005	17.11
6	2006	6.60
7	2007	6.59
8	2008	11.06
9	2009	2.78
10	2010	6.96
11	2011	3.79
12	2012	4.30
13	2013	8.38
14	2014	8.36
15	2015	3.35
16	2016	3.52
17	2017	3.80

Sumber : Wordbank



Gambar 1.1 Perkembangan Inflasi Tahun 2001 - 2017

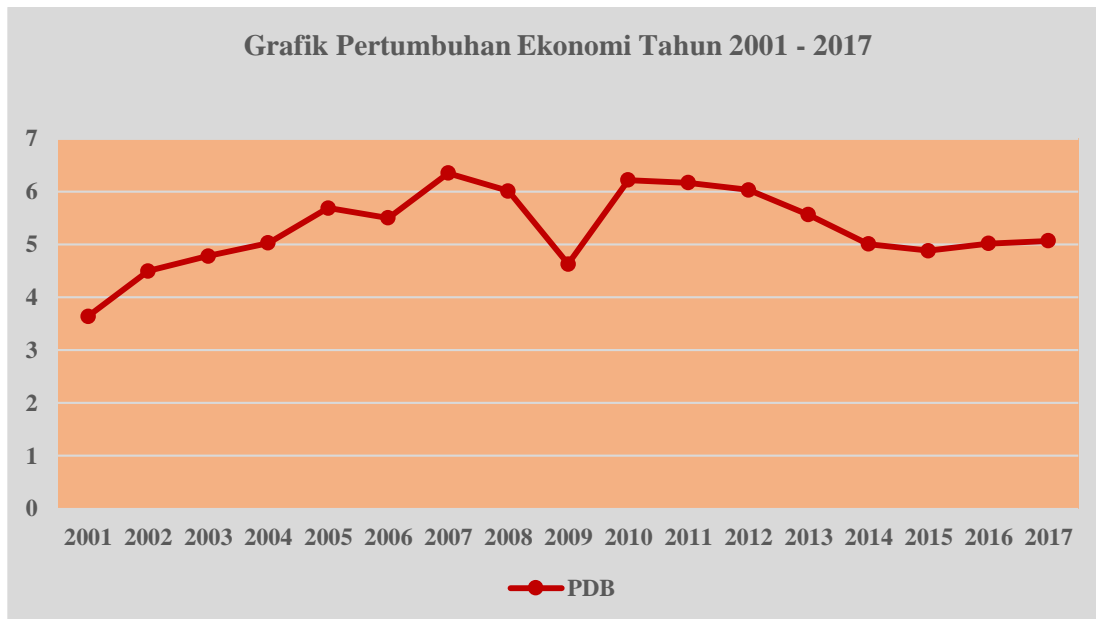
Sumber : Tabel 1.1

Dari Tabel 1.1 dan grafik diatas menunjukkan data perkembangan inflasi yang berfluktuatif dari tahun 2001 sampai 2017. Perkembangan inflasi pada tahun 2005 mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 17.11 persen, hal ini disebabkan karena kenaikan harga BBM dan Pangan. Di tahun 2008 inflasi naik keposisi 11.06 persen dikarenakan pada saat itu terjadi krisis global yang melanda dunia sehingga berdampak pada perekonomian di Indonesia. Kemudian pada 2013 – 2014 Inflasi meningkat kembali dengan nilai 8.38 persen hal ini dikarenakan ada faktor yang menyebabkan kenaikan tingkat inflasi yaitu kenaikan tingkat harga barang impor karena semakin melemahnya nilai rupiah, adanya kenaikan tingkat upah tenaga kerja menyebabkan biaya produksi meningkat sehingga memicu kenaikan harga jual didalam negeri dan adanya kenaikan harga BBM .

Tabel 1.2 Data Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2001 s/d 2017

No	Tahun	Pertumbuhan (%)
1	2001	3.64
2	2002	4.50
3	2003	4.78
4	2004	5.03
5	2005	5.69
6	2006	5.50
7	2007	6.35
8	2008	6.01
9	2009	4.63
10	2010	6.22
11	2011	6.17
12	2012	6.03
13	2013	5.56
14	2014	5.01
15	2015	4.88
16	2016	5.02
17	2017	5.07

Sumber : Wordbank



Gambar 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2001 – 2017

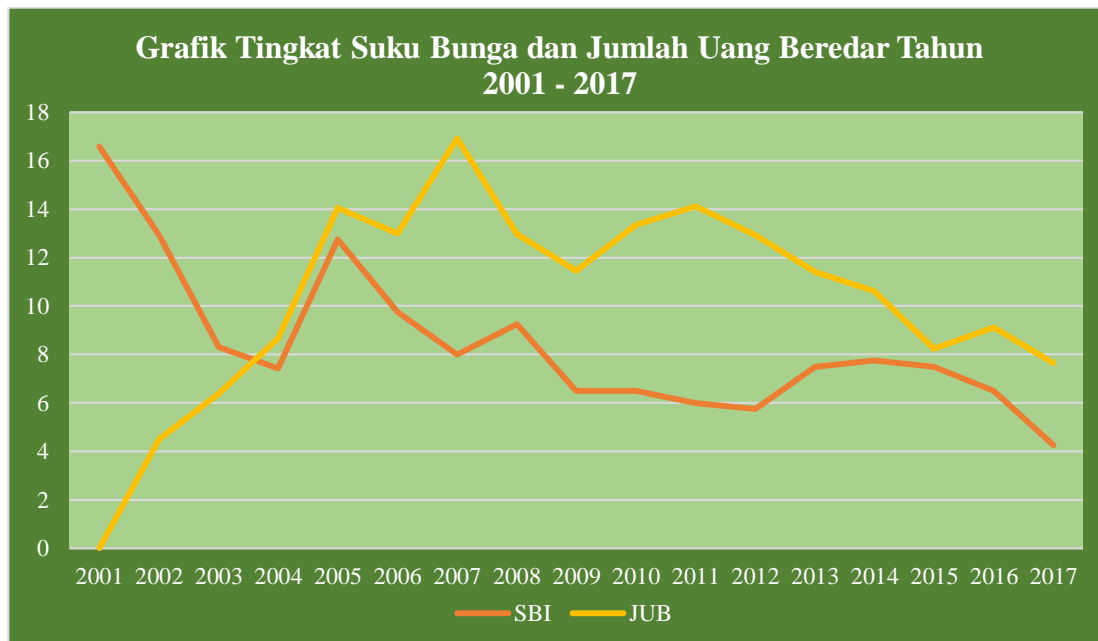
Sumber :Tabel 1.2

Grafik diatas melihat pertumbuhan ekonomi PDB tahun 2001 -2017. Dapat dilihat bahwa pertumbuhan PDB dari tahun 2001-2007 meningkat, tapi nilainya tidak begitu besar. Pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan hingga mencapai 4.63 persen yang disebabkan oleh dampak dari krisis ekonomi global (pernyataan ini diperkuat oleh penelitian terdahulu Hervita : 2015). Pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi meningkat dengan nilai 6.22 persen. Kemudian di tahun 2015 pertumbuhan ekonomi melambat dibanding pertumbuhan ekonomi pada periode tahun lalu yang mencapai 4.88 persen, melambatnya pertumbuhan ekonomi disebabkan karena turunnya harga minyak dunia dan menurunnya nilai ekspor akibat rendahnya harga komoditas seperti minyak sawit dan karet.

Tabel 1.3 Data Tingkat Suku Bunga dan Jumlah Uang Beredar Tahun 2001 s/d2017

No	Tahun	Suku Bunga (%)	JUB (%)
1	2001	16.59	-
2	2002	12.93	4.50
3	2003	8.31	6.40
4	2004	7.43	8.65
5	2005	12.75	14.04
6	2006	9.75	13.00
7	2007	8.00	16.91
8	2008	9.25	12.98
9	2009	6.50	11.46
10	2010	6.50	13.34
11	2011	6.00	14.11
12	2012	5.75	12.93
13	2013	7.50	11.40
14	2014	7.75	10.61
15	2015	7.50	8.25
16	2016	6.50	9.11
17	2017	4.25	7.64

Sumber :www.bps.go.id



Gambar 1.3 Tingkat Suku Bunga dan Jumlah Uang Beredar Tahun 2001 – 2017

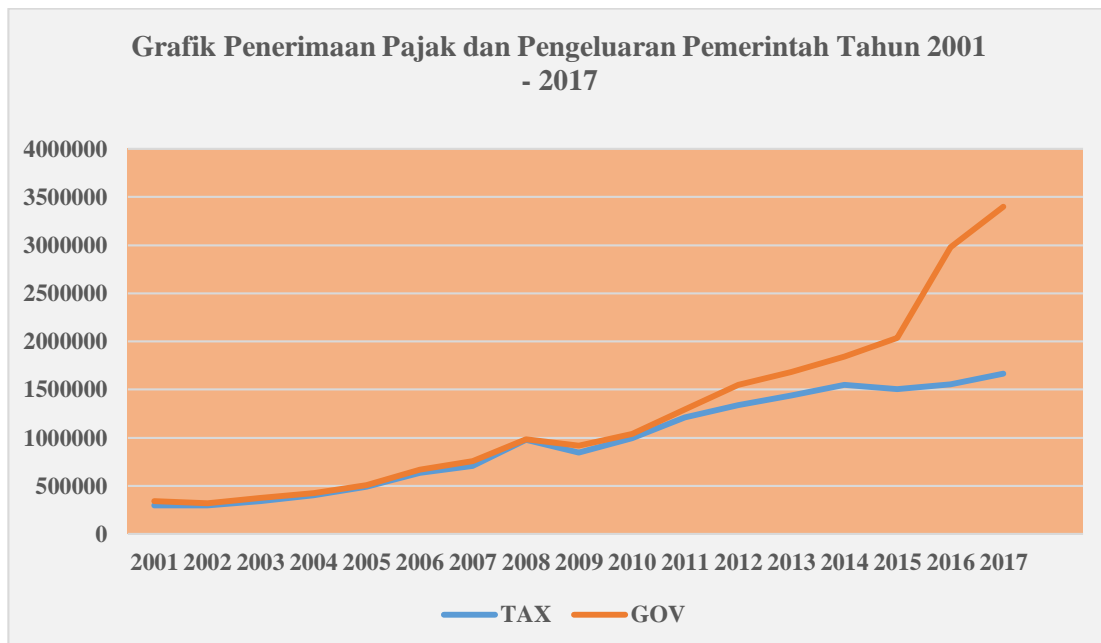
Sumber :Tabel 1.3

Digambarkan pada grafik diatas menunjukkan suku bunga pada tahun 2005 dibuka pada level tinggi dengan nilai sebesar 12.75 persen. Kemudian pada tahun 2006 - 2007 kondisi suku bunga berangsur menurun menjadi 8.00 persen. Kondisi demikian disebabkan mulai kondusifnya perekonomian dalam negeri dan perbaikan pada sektor keuangan. Sedangkan JUB masih mengalami fluktuasi mengingat bahwa perputaran uang dimasyarakat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, namun persentase tertinggi berada pada level 19.91 persen ini terjadi pada tahun 2007. Kemudian pada tahun 2008 suku bunga mengalami kenaikan kembali dengan nilai 9.25 persen hal ini disebabkan karena inflasi melejit, hampir semua harga komoditas dan jasa meningkat. Seperti dikatakan sebelumnya bahwa Bank Indonesia menetapkan BI Rate untuk mempengaruhi inflasi, maka Bank Indonesia perlu juga mengendalikan jumlah uang beredar. Hal ini sesuai teori moneter Aliran Keynes (Keynesian), jika tingkat suku bunga tinggi maka jumlah uang beredar di masyarakat sedikit, sebaliknya jika tingkat suku bunga rendah maka jumlah uang beredar di masyarakat besar.

Tabel 1.4 Data Penerimaan Pajak dan Pengeluaran Pemerintah Tahun 2001 s/d 2017

No	Tahun	TAX (%)	GOV (%)
1	2001	300599	341562
2	2002	298527	322179
3	2003	340928	376505
4	2004	403104	427176
5	2005	493919	509632
6	2006	636153	667128
7	2007	707806	757649
8	2008	981609	985270
9	2009	848763	917653
10	2010	995271	1042159
11	2011	1210599	1294625
12	2012	1338109	1551500
13	2013	1438891	1683011
14	2014	1550490	1842495
15	2015	1508020	2039483
16	2016	1555934	2978510
17	2017	1666375	3400803

Sumber : www.bps.go.id



Gambar 1.4 Penerimaan Pajak dan Pengeluaran Pemerintah Tahun 2001 – 2017

Sumber : Tabel 1.4

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa dilihat pajak dan pengeluaran pemerintah selama periode 2001 sampai 2017 yang mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2001 sampai 2008 penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan. Di tahun 2009 penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah menurun secara bersamaan dengan nilai sebesar 848763 untuk penerimaan pajak dan 917653 untuk pengeluaran pemerintah. Hal ini dikarenakan terjadinya krisis ekonomi dunia, dampak negative dan krisis ekonomi dunia terhadap Indonesia dipastikan mengakibatkan penerimaan pajak mengalami sortfall (penerimaan dibawah target). Kemudian pada tahun 2010 sampai 2017 penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah terjadi peningkatan kembali. Peningkatan pajak dan pengeluaran pemerintah akan berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perubahan inflasi di Indonesia yaitu suku bunga acuan Bank Indonesia atau dengan kata lain BI Rate yang menjadi signal bagi perbankan untuk menetapkan tingkat suku bunganya seperti tabungan, deposito dan kredit. Menurut Yodiatmaja (2012), perubahan BI *Rate* akan mempengaruhi beberapa variabel makroekonomi yang kemudian diteruskan kepada inflasi. Perubahan berbentuk peningkatan level BI *Rate* bertujuan untuk mengurangi laju aktifitas ekonomi yang mampu membawa dampak inflasi. Ketika level BI *Rate* naik maka suku bunga kredit dan deposito pun akan mengalami kenaikan. Ketika suku bunga deposito naik, masyarakat akan cenderung menyimpan uang di bank dan jumlah uang yang beredar berkurang. Pada suku bunga kredit, kenaikan suku bunga akan merangsang para pelaku usaha untuk mengurangi investasinya karena biaya

modal semakin tinggi. Hal demikianlah yang meredam aktivitas ekonomi dan pada akhirnya mengurangi tekanan inflasi.

Standar hidup suatu bangsa sangat ditentukan oleh kebijakan makro ekonomi yang dijalankan oleh pemerintahnya. Pemerintah Indonesia memiliki sejumlah instrument untuk mempengaruhi kebijakan makro ekonominya. Instrument kebijakan merupakan suatu variabel dari ekonomi yang berada dibawah kontrol pemerintah yang dapat mempengaruhi sasaran makro ekonomi. Kebijakan makro ekonomi seperti dengan memberlakukan kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal, pemerintah dapat mengendalikan perekonomian menuju suatu komposisi output, stabilitas harga serta perdagangan internasional yang lebih baik. Pemerintah juga melakukan banyak pengeluaran untuk membiayai kegiatan perekonomian dalam arti pemerintah harus menggerakkan dan merangsang kegiatan ekonomi secara umum (Rahayu, 2011).

Variabel-variabel yang akan dijelaskan pada penelitian ini merupakan variabel-variabel dari kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Variabel yang dimaksud adalah: inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat suku bunga, jumlah uang beredar, penerimaan pajak, dan pengeluaran pemerintah. Variabel-variabel tersebut pernah digunakan oleh beberapa peneliti terdahulu untuk menganalisis, namun belum mencapai kesimpulan yang sama. Hal ini menjadi daya tarik bagi peneliti untuk coba menguji kembali hubungan variabel-variabel tersebut secara khusus untuk kasus Indonesia pada periode 2001-2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan moneter dan kebijakan fiskal terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena masalah yang telah diungkapkan pada latar belakang masalah, maka penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Terjadi peningkatan laju inflasi yang cukup tinggi pada tahun 2005 yang disebabkan karena kenaikan harga bahan bakar minyak dan pangan.
- b. Terjadi penurunan terhadap PDB pada tahun 2009 yang disebabkan karena krisis ekonomi global yang sangat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
- c. Terjadi fluktuasi tingkat suku bunga dan terjadi peningkatan pada Jumlah uang beredar pada tahun 2005 yang disebabkan karena tingginya laju inflasi.
- d. Terjadinya penurunan terhadap penerimaan pajak pada tahun 2010 disebabkan karena menurunnya kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak sehingga menyebabkan pengeluaran pemerintah ikut menurun.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi agar pembahasannya lebih fokus dan terarah serta tidak menyimpang dari tujuan yang diinginkan. Dengan demikian penulis membatasi masalah pada interaksi moneter dan fiskal terhadap guncangan output dan inflasi di Indonesia yang diukur dari inflasi, PDB, suku bunga, jumlah uang beredar, kurs pajak , pengeluaran pemerintah dan investasi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan fenomena masalah maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh secara simultan suku bunga, jumlah uang beredar, kurs, investasi dan PDB terhadap inflasi ?
2. Bagaimana pengaruh secara simultan pajak, pengeluaran pemerintah, investasi dan inflasi terhadap PDB?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan :

1. Menganalisis pengaruh secara simultan suku bunga, jumlah uang beredar, kurs, investasi dan PDB terhadap inflasi.
2. Menganalisis pengaruh secara simultan pajak, pengeluaran pemerintah investasi dan inflasi terhadap PDB.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai proses belajar dalam mengamati, mengumpulkan dan menganalisis data bagi penulis.

2. Bagi Peneliti Berikutnya

Penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi yang bermanfaat dan rujukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

F. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu yang berjudul “Analisis Dampak Kebijakan Moneter terhadap Perkembangan Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Sedangkan penelitian ini berjudul “Teliti Interaksi Moneter dan Fiskal Terhadap Goncangan Output dan Inflasi di Indonesia”

Perbedaan penelitian terletak pada :

1. Variabel Penelitian : Penelitian terdahulu menggunakan 3 (tiga) variabel bebas yaitu jumlah uang beredar, suku bunga, kurs dan 2 (dua) variabel terikat yaitu inflasi dan PDB Sedangkan penelitian ini menggunakan 6 (enam) variabel bebas yaitu suku bunga, jumlah uang beredar, kurs, pajak, pengeluaran pemerintah, investasi dan 2 (dua) variabel terikat yaitu inflasi dan Pdb.
2. Model Penelitian : Penelitian terdahulu menggunakan model Structural Vector Autoregress (SVAR) sedangkan penelitian ini menggunakan model Simultan.
3. Waktu Penelitian : Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 1980 – 2008 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2001 – 2017.

Perbedaan variabel penelitian, model penelitian dan waktu penelitian menjadikan perbedaan yang membuat keaslian penelitian ini terjamin dengan baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan teori

1. KEBIJAKAN MONETER

Kebijakan moneter merupakan suatu upaya dari pemerintah dalam mengendalikan keadaan makro ekonomi supaya dapat bekerja seperti yang diinginkan melalui pengendalian jumlah uang beredar pada masyarakat dalam perekonomian (Yuliadi,2008). Upaya yang telah dilakukan supaya terbentuknya kestabilan harga serta dalam meningkatkan output dalam keseimbangan.

Kebijakan moneter merupakan kebijakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mendapatkan keseimbangan internal seperti pertumbuhan ekonomi yang meningkat, kestabilan harga, dan pemerataan pembangunan, dan juga keseimbangan eksternal seperti keseimbangan neraca pembayaran, kemudian tercapainya tujuan dari ekonomi makro, yakni menjaga kestabilan ekonomi yang dapat ditakar pada keluasan pekerjaan, kestabilan pada harga-harga dan juga neraca pembayaran internasional yang sebanding. Jika kestabilan harga-harga dalam aktivitas perekonomian terhambat, maka dalam kebijakan moneter ini akan digunakan untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Dampak dari kebijakan moneter dapat dilalui pada sektor perbankan yang kemudian akan dikirim pada sektor riil.

Kebijakan moneter merupakan usaha untuk tercapainya tingkat dari pertumbuhan ekonomi dengan berkesinambungan untuk tetap akan mempertahankan kestabilan harga (Yuliadi, 2008). Untuk mencapai tujuan dari Bank Sentral berusaha akan mengatur keseimbangan dalam persediaan uang dan persediaan barang-barang agar

inflasi tetap akan terkendali, tercapainya kesempatan kerja dan kelancaran dalam pasokan barang. Kebijakan moneter dilakukan pada instrument sebagai berikut yaitu : tingkat suku bunga , giro wajib umum, campur tangan dalam pasar valuta asing dan sasaran terakhir bagi bank untuk meminjamkan uang ketika sedang mengalami kesulitan pada likuiditas.

Bank sentral merupakan lembaga yang berkuasa mengambil jalan kebijakan moneter untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Dalam pengendalian jumlah uang beredar pada masyarakat diatur dengan upaya untuk menambah ataupun mengurangi jumlah uang beredar.

Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :

- Kebijakan moneter ekspansif (Monetary expansive policy) adalah suatu kebijakan yang menambah jumlah uang beredar.
- Kebijakan moneter kontraktif (Monetary contractive policy) adalah suatu kebijakan yang mengurangi jumlah uang beredar. Biasanya disebut sebagai kebijakan uang ketat atau *Tight Money Policy* (Yuliadi, 2008).

a. Pelaksanaan Kebijakan Moneter di Indonesia

Kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh bank Indonesia dalam mewujudkan stabilitas ekonomi makro terdiri dari kerangka strategis dan juga kerangka operasional. Kerangka strategis umumnya terkait dengan pencapaian tujuan akhir kebijakan moneter (stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja) serta strategi untuk mencapainya (exchange rate targeting,

monetary targeting, inflation targeting, implicit but not explicit anchor) (Warjiyo dan Solikin, 2004)

Pada konteks operasional dari kebijakan moneter terdiri dari instrument, sasaran operasional dan sasaran yang digunakan untuk mencapai pada sasaran akhir. Sasaran-antara yang diperlukan dikarenakan adanya time lag antara implementasi atas kebijakan moneter demi keberhasilan tercapainya pada sasaran akhir, maka untuk melihat efektifnya suatu kebijakan maka dibutuhkan adanya suatu kebijakan yang akan dilihat dengan cepat. Agar tercapainya sasaran-antara ini, dibutuhkan suatu sasaran dalam operasional supaya sistem transmisi dapat bekerja sesuai yang telah direncanakan . Ukuran dalam sasaran-operasional ini ialah mempunyai kestabilan hubungan yang erat dengan sasaran-antara dapat dikendalikan oleh bank sentral dan informasi dapat diketahui lebih awal dari pada sasaran-antara tersebut. Sedangkan instrumen moneter merupakan instrument yang dimiliki bank sentral yang dapat mempengaruhi sasaran operasional yang telah ditetapkan.

Indikator dari kebijakan moneter dilakukan dengan berbagai pertimbangan sebagai berikut :

1. Dalam merumuskan kebijakan moneter, bank Indonesia akan selalu melaksanakan analisis dan mempertimbangkan berbagai indikator dari ekonomi, khususnya perkiraan inflasi, pertumbuhan ekonomi, besaran dari moneter dan perkembangan sektor ekonomi dan keuangan dengan keseluruhan.

2. Bank Indonesia akan selalu memperhatikan langkah dalam kebijakan ekonomi yang ditempuh pemerintah. Langkah koordinasi kebijakan yang selama ini telah berlangsung baik akan terus diperkuat dan ditingkatkan.
3. Analisis dan perkiraan dari berbagai variabel ekonomi dipertimbangkan untuk mengarahkan prakiraan inflasi kedepan sejalan dengan sasaran inflasi yang telah ditetapkan.

b. Transmisi Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter menyanggung ialah dengan suatu mekanisme yang kompleks karena uang berhubungan erat dengan seluruh arah kehidupan perekonomian. Proses ini biasanya juga disebut sebagai mekanisme transmisi kebijakan moneter. Menurut Taylor (1995) menyatakan bahwa mekanisme transmisi kebijakan moneter adalah *“the process through which monetary policy decisions are transmitted into changes in real GDP and inflation”*. Mekanisme transmisi dimulai semenjak otoritas moneter berbuat menggunakan instrument moneter dalam mengimplementasi kebijakan moneternya sampai terlihat dampaknya terhadap aktivitas perekonomian, baik secara langsung maupun secara bertahap.

Dampak akibat dari otoritas moneter terhadap aktivitas perekonomian ini akan terjadi melalui berbagai saluran yaitu, saluran langsung, saluran suku bunga, saluran kredit, saluran nilai tukar, saluran harga asset dan saluran ekspektasi. Dalam bidang keuangan, kebijakan moneter berdampak pada perkembangan suku bunga, nilai tukar, dan harga saham di samping volume dana masyarakat yang disimpan di bank, kredit yang disalurkan bank kepada dunia usaha, penanaman dana pada obligasi dan

saham. Tatkala pada sektor riil, kebijakan moneter mengakibatkan kegiatan konsumsi, investasi dan produksi, ekspor dan impor, serta harga-harga pada barang dan jasa.

Pandangan dari kompleksitasnya, pada teori ekonomi moneter, mekanisme transmisi kebijakan moneter sering disebut sebagai “*black box*” (Mishkin: 2004), karena transmisi yang dimaksud banyak dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu :

1. Perubahan perilaku dari bank sentral, perbankan, dan para pelaku ekonomi dalam berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan.
2. Lamanya tenggat waktu (time lag) semenjak tindakan otoritas moneter sampai sasaran akhir tercapai.
3. Terjadinya perubahan pada saluran transmisi moneter sesuai dengan perkembangan perekonomian dan keuangan negara yang bersangkutan.

Saluran Transmisi Kebijakan Moneter

Sejalan dengan perubahan struktur perekonomian yang cukup dikatakan pesat dalam bidang keuangan, terdapat enam saluran mekanisme transmisi kebijakan moneter yang sudah sering dikemukakan dalam teori moneter dewasa ini. (Mishkin: 2004). Keenam saluran tersebut, yaitu :

1. Saluran Langsung

Transmisi kebijakan moneter melalui saluran langsung atau saluran uang (money channel) mengacu pada teori klasik mengenai peranan uang dalam perekonomian, yang pertama kali dijelaskan dalam Teori Kuantitas Uang atau *Quantity Theory of Money* (Fisher: 1911). Pada dasarnya teori ini menggambarkan kerangka yang jelas

mengenai analisis hubungan langsung antara uang beredar dan harga, yang dinyatakan dalam suatu persamaan:

$$MV = PT$$

Dimana: M = Jumlah uang beredar

V = Perputaran Uang (Income Velocity)

P = Tingkat harga barang dan jasa

T = Jumlah Output

Pada teori kuantitas uang ini, menekankan bahwa permintaan uang oleh masyarakat hanya digunakan untuk keperluan transaksi. Dalam perkembangannya, pendekatan ini diperbaharui oleh Keynes, yang menyatakan bahwa motif permintaan masyarakat akan uang adalah untuk keperluan transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi.

2. Saluran Suku Bunga

Pada saluran suku bunga, hal ini lebih menekankan pentingnya aspek harga di pasar keuangan terhadap berbagai aktivitas ekonomi pada sektor riil. Dalam kaitan ini, kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral akan berpengaruh terhadap berbagai suku bunga di sektor keuangan dan kemudian akan berpengaruh terhadap tingkat inflasi dan output riil.

3. Saluran Kredit

Dalam pendekatan mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui saluran kredit didasarkan bahwa tidak semua simpanan masyarakat dalam bentuk uang (M_1 , M) disalurkan oleh bank kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Dengan kata lain, fungsi dari intermediasi perbankan tidak selalu berjalan sempurna, maksunya kenaikan simpanan masyarakat tidak selalu diikuti dengan kenaikan secara

proposional kredit yang disalurkan kepada masyarakat. Yang lebih berpengaruh pada ekonomi riil adalah kredit perbankan, bukan simpanan masyarakat.

4. Saluran Nilai Tukar

Dalam pendekatan mekanisme kebijakan moneter melalui saluran nilai tukar, menekankan pentingnya aspek perubahan harga asset finansial terhadap berbagai aktivitas perekonomian. Pentingnya saluran nilai tukar terhadap kebijakan moneter terletak pada pengaruh asset finansial dalam valuta asing yang berasal dari hubungan kegiatan ekonomi suatu negara dengan negara lain.

5. Saluran Harga Aset

Perubahan pada harga aset, baik aset finansial (obligasi dan saham) maupun aset fisik (properti dan emas) banyak dipengaruhi secara langsung terhadap kebijakan moneter. Transmisi saluran harga aset terjadi karena penanaman dana oleh para investor dalam portofolio investasinya yang biasanya tidak berupa simpanan di bank dan instrument lain pada pasar uang, tetapi juga dalam bentuk obligasi dan saham serta aset fisik.

6. Saluran Ekspetasi

Dalam latar belakang kebijakan moneter, yang paling diperhatikan oleh masyarakat adalah ekspetasi inflasi. Teori ekspetasi berpendapat bahwa apabila masyarakat cukup rasional, mereka akan mengambil tindakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya inflasi. Tindakan ini berupa pengurangan jumlah uang yang beredar dengan membelanjakannya dalam bentuk barang-barang riil sehingga resiko kerugian memegang uang karena inflasi dapat dihindari.

2. KEBIJAKAN FISKAL

Kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan makro ekonomi yang kekuasaannya berada pada tangan pemerintahan dan diwakili oleh Kementerian Keuangan. Hal ini diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang menyatakan bahwa presiden telah memberikan kekuasaan pengelolaan keuangan dan juga kekayaan negara oleh Menteri Keuangan dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan suatu negara yang dipisahkan.

Menurut Rozalinda, “kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran negara yang digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi”.

Kebijakan fiskal mempunyai tujuan untuk menggerakkan aktivitas ekonomi negara, yakni dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menstabilkan harga, dan pemerataan pendapatan. Dampak dari kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi selalu diharapkan positif, sedangkan dampaknya terhadap inflas diharapkan negatif. Akan tetapi secara teori, kebijakan fiskal berkembang dengan melakukan peningkatan pengeluaran pemerintah tanpa terjadinya sumber pajak, sebagai sumber keuangan utama bagi pemerintah, yang akan mengakibatkan terhadap defisit anggaran (Sriyana, 2005).

Kebijakan fiskal merupakan langkah-langkah dari pemerintah untuk mengelola dan pengeluaran dan perpajakan atau penggunaan instrument fiskal untuk mempengaruhi bekerjanya sistem ekonomi supaya memaksimalkan kesejahteraan perekonomian (Madjid, Kemenkeu RI 2012). Kebijakan fiskal sering diartikan

sebagai sarana pengelolaan anggaran pemerintah untuk mempengaruhi suatu perekonomian, termasuk dalam kebijakan perpajakan yang dipungut kemudian dihimpun, pembayaran transfer, pembelian barang dan jasa oleh pemerintah, serta ukuran deficit dan pembiayaan anggaran yang mencakup semua level pemerintahan (Govil, 2009). Defenisi lain menyebutkan, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran uang pemerintah (Basri, 2002).

a. Orientasi Kebijakan Fiskal

Setelah krisis multi–dimensi 1997, kebijakan fiskal yang ditempuh oleh pemerintah diarahkan pada dua sasaran utama, yaitu untuk mendukung konsolidari fiskal guna mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (fiskal sustainability) dan untuk menciptakan ruang gerak fiskal (fiskal space) satu yang memadai guna memperkuat stimulus fiskal. Sehingga mampu menggerakkan perekonomian domestik. Kedua sasaran tersebut masih tetap menjadi prioritas kebijakan dalam tahun – tahun selanjutnya . Dalam periode 2000 – 2009 upaya pencapaian sasaran kebijakan fiskal tersebut dibagi menjadi fase konsolidasi (penyehatan). APBN dalam periode 2000 – 2005 dan fase stimulus fiskal dalam periode 2006 – 2009. Secara operasional, konsolidasi fiskal APBN diupayakan melalui pengendalian defisit anggaran dengan langkah – langkah sebagai berikut:

- Pertama, peningkatan pendapatan negara yang dititikberatkan pada peningkatan penerimaan perpajakan dan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

- Kedua, pengendalian dan penajaman prioritas alokasi belanja negara dengan tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan alokasi belanja minimum
- Ketiga, pengelolaan utang negara yang sehat dalam rangka menutupi kesenjangan pembiayaan anggaran yang dihadapi pemerintah.
- Keempat, perbaikan struktur penerimaan dan alokasi belanja negara dengan memperbesar peranan sektor pajak nonmigas, dan pengalihan subsidi secara bertahap kepada bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat yang kurang mampu agar lebih tepat sasaran.
- Kelima, pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan, yang dilakukan melalui perbaikan manajemen pengeluaran negara.

Sementara itu penguatan stimulus fiskal terutama diupayakan melalui optimalisasi belanja negara untuk sarana dan prasarana pembangunan, alokasi belanja negara untuk kegiatan-kegiatan yang mampu menggerakkan perekonomian, serta pemberian insentif fiskal (perpajakan) (Nizar,2010).

b. Fungsi Kebijakan Fiskal

Pemerintah terkadang memfokuskan pada tujuan-tujuan yang lebih spesifik agar dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi (Tanzi, 1991).

Tujuan-tujuan spesifik dari kebijakan fiskal tersebut antara lain:

- Koreksi atau ketidakseimbangan sementara
- Stimulasi terhadap pertumbuhan ekonomi
- Redistribusi pendapatan

Dengan berbagai tujuan spesifik tersebut, maka secara bersamaan terdapat kebijakan fiskal jangka pendek atau stabilisasi, dan kebijakan fiskal jangka panjang. Terdapat tiga aktivitas utama dari otoritas fiskal yang mencerminkan fungsi spesifik dari kebijakan fiskal yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

a. Alokasi

Pemerintah telah melakukan campur tangan terhadap perekonomian dalam mendistribusikan suatu sumber daya ekonominya. Campur tangan dari pemerintah ini akan dilakukan secara langsung membeli barang seperti pertahanan dan juga pendidikan, kemudian dilakukan secara tidak langsung melalui beragam pajak dan subsidi-subsidi yang mendorong berbagai aktivitas ataupun menghambat aktivitas lainnya.

b. Distribusi

Hal ini berhubungan dengan bagaimana barang yang telah diproduksi oleh masyarakat dan didistribusikan diantara anggotanya, terkait pada isu misalnya seperti pemerataan , dan juga trade-offs.

c. Stabilisasi

Tanggungannya adalah untuk menjamin suatu perekonomian tetap dalam kesempatan kerja penuh atau *full employment* dengan kestabilan harga.

c. Instrumen Kebijakan Fiskal

Instrument kebijakan fiskal merupakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan sangat erat dengan penerimaan pajak. Apabila kita mengubah

besar atau kecilnya pajak yang berlaku akan berpengaruh terhadap ekonomi. Terkait dengan penganggaran kebijakan fiskal dapat terbagi menjadi tiga bagian, yaitu :

1) Anggaran belanja seimbang

Sesuai dengan namanya seimbang, maka menggunakan perpaduan antara anggaran surplus, yaitu dengan memadukan antara konsep pengeluaran banyak dari pemasukan dan juga menggunakan konsep pemasukan yang lebih banyak daripada pengeluaran. Pada dasarnya anggaran seimbang ini menjadi salah satu perantara diantara keduanya, anggaran ini bisa menggunakan anggaran sesuai dengan waktu dan kondisinya. Ketika keadaan perekonomian negara mengalami inflasi maka anggaran surplus, dan ketika situasi menunjukkan keadaan yang tidak stabil maka anggaran yang digunakan adalah anggaran defisit.

2) Pembiayaan Fungsional

Pada kebijakan ini fokus penyesuaian anggaran negara dengan menentukan biaya atau anggaran yang digunakan oleh pemerintah dengan sedemikian rupa hingga tidak memiliki pengaruh bagi pendapatan atau pemasukkan negara secara langsung. Kebijakan pembiayaan fungsional mempunyai tujuan untuk menyerap sebanyak-banyaknya tenaga kerja dengan membuka lapangan pekerjaan baru. Dalam kebijakan ini penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah ditempatkan dalam tempat yang berbeda. Kebijakan ini dipelopori oleh A.P Liner.

3) Anggaran Defisit atau Kebijakan Fiskal Ekspansif

Anggaran defisit merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan stimulus pada perekonomian dengan mengupayakan membuat pengeluaran negara untuk belanja dan pengeluaran lebih besar daripada pemasukan

yang ada selama kurun waktu tertentu. Mungkin kita berpikir mengapa kebijakan ini dipakai padahal dilihat dari satu sisi hal ini sangat merugikan negara, namun sebenarnya tidak pada dasarnya kebijakan ini hanya dilakukan untuk kondisi ekonomi yang resesif dikarenakan hal ini akan sangat menguntungkan bagi negara.

4) Anggaran Surplus atau Kebijakan Fiskal Kontraktif

Dalam anggaran surplus pemasukan negara adalah menjadi fokus perhatian yang sangat diharapkan pemasukan negara lebih besar daripada pengeluaran negara baik untuk pembangunan ataupun investasi. Kebijakan ini dilakukan ketika kondisi ekonomi yang ekspansi serta memanas (*overheating*). Hal ini dilakukan hanya untuk menurunkan tekanan yang tinggi dari permintaan.

5) Stabilitas Anggaran Otomatis

Stabilitas diartikan sebagai upaya untuk mempertahankan keadaan perekonomian yang sudah baik dengan cara menyesuaikan anggaran yang dimiliki negara, dengan memperhatikan penggunaan biaya, dalam kebijakan ini selalu diusahakan untuk menekan pengeluaran negara dengan suatu yang lebih bermanfaat dan tentunya dengan biaya minimum dan dapat membuahkan banyak hasil.

6) Pengelolaan Anggaran

Pengelolaan anggaran adalah usaha dari pemerintah untuk menjaga kestabilan negara. Cara yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan serta menggunakan hasil pajak sebagai modal dasarnya. Dimana hasil pajak menjadi kesatuan utuh dalam hal penerimaan dan pengeluaran negara. Konsep dalam pengelolaan anggaran ini searah dengan adanya anggaran seimbang, dimana ketika keadaan perekonomian lesu ataupun tidak berkembang maka anggaran surplus yang diterapkan. Sedangkan ketika terjadi

inflasi akan menerapkan tanpa adanya dana, hanya BMT. Untuk pendekatan pengelolaan anggaran ini dicetuskan oleh Alvin Hansen.

3. Output Dan Inflasi Di Indonesia

a. PDB

Ekonomi bertumbuh adalah titik keseimbangan perekonomian suatu negara antara permintaan agregat dan penawaran agregat semakin baik dari sebelumnya. Keynes percaya pemerintahan campur tangan untuk mengendalikan perekonomian agar tercapai pada posisi keseimbangan. Pemerintah mempengaruhi permintaan agregat masyarakat supaya full employment. PDB di produksi agar dibeli seluruh masyarakat dalam pasar barang. Dalam pasar uang alasan memegang uang yaitu untuk kebutuhan transaksi, berjaga-jaga dan spekulasi. Tingkat bunga menentukan pengeluaran investasi investor yang menentukan tingkat permintaan agregat. Pemerintah mengurangi pengangguran dan mengendalikan pasar agar tercapai full employment. (Boediono, 1982).

Mengukur produk domestik bruto mendapatkan hasil yang baik, yaitu :

1. Barang akhir dan nilai tambah, yaitu perhitungan ganda di hindari dengan menggunakan nilai tambah (*value added*), selisih antara nilai barang ketika meninggalkan tahap produksi dan biaya barang ketika memasuki tahap itu.
2. Output sekarang yaitu PDB merupakan nilai output yang sekarnag diproduksi, mengeluarkan transaksi komoditi misalnya pemilik lama atau perumahan yang sudah ada.

3. Mengukur kesejahteraan suatu negara.

Ketika suatu variabel diukur dengan uang saat ini, mencerminkan nilai nominal. PDB nominal adalah PDB diukur dengan nilai uang saat ini. PDB nominal mengukur nilai output dalam suatu periode menggunakan harga pada periode tersebut atau harga berlaku. PDB nominal disesuaikan dengan perubahan harga di sebut PDB riil. PDB riil mengukur perubahan output fisik dalam perekonomian antara periode berbeda dengan menilai semua barang diproduksi dalam dua periode tersebut pada harga sama atau harga konstan. Ketika harga barang naik maka pembeli mengalihkan konsumsi dari barang mahal ke barang relatif murah (*Mankiw, 2007*).

Rumus PDB :

$$\mathbf{PDB = C + I + G + (X-M)}$$

Dimana :

PDB = Produk Domestik Bruto

C = Konsumsi

I = Investasi

G = Government (pengeluaran pemerintah)

X = Ekspor

M = Impor

b. Inflasi

Salah satu peristiwa modern yang sangat penting dan yang selalu dijumpai hamper semua negara di dunia adalah inflasi. Defenisi dari inflasi adalah kecenderungan harga-harga untuk menaik secara umum dan terus menerus (*Mankiw, 2006*). Ini tidak berarti bahwa harga-harga berbagai macam barang itu naik dengan persentase yang sama. Mungkin kenaikan ini dapat terjadi tidak bersamaan, yang

paling penting terdapat kenaikan harga umum barang secara terus menerus selama satu periode tertentu. Kenaikan yang hanya terjadi sekali saja meskipun dalam persentase yang besar, bukanlah ini merupakan inflasi.

Penggolongan inflasi dibedakan menjadi 4 macam, yaitu (Boediono, 1982)

- a) Inflasi Ringan : <10% per tahun
- b) Inflasi Sedang : 10-30% per tahun
- c) Inflasi Berat : 30-100% per tahun
- d) Hiperinflasi : $\geq 100\%$ per tahun

Menentukan tingkat inflasi ; tingkat inflasi digunakan untuk menggambarkan perubahan pada harga-harga yang berlaku dari satu period ke perioden yang lainnya. Untuk mengukur laju kenaikan tingkat harga-harga umum atau inflasi, dapat digunakan rumus umum sebagai berikut :

$$I_t = \frac{HU_t - HU_{t-1}}{HU_{t-1}}$$

Dimana :

I_t = Tingkat inflasi

HU_t = Harga umum aktual pada periode t

HU_{t-1} = Harga umum actual pada periode t-1

4. Interaksi Moneter Dan Fiskal Terhadap Guncangan Output Dan Inflasi Di Indonesia

Kebijakan moneter menurut Nopirin adalah tindakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan kredit yang akan berdampak pada kebijakan ekonomi masyarakat. Menurut Monetaris kebijakan yang paling tepat untuk menstabilkan perekonomian adalah kebijakan moneter. Mereka percaya kebijakan moneter memiliki pengaruh langsung terhadap perekonomian. Pendapat ini didasarkan pada pemikiran bahwa permintaan uang untuk spekulasi adalah tidak penting, menurut mereka uang terutama untuk membiayai transaksi (Froyen, 2002). Kebijakan moneter meliputi semua tindakan pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian melalui penambahan atau pengurangan dari jumlah uang beredar yang disebut juga penawaran uang (money supply).

Kebijakan fiskal adalah tindakan yang dilakukan pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian melalui penambahan ataupun pengurangan pemerintah (Pajak), mempunyai pajak atau Tax, transfer payment atau Tr, dan pengeluaran pemerintah atau G (Teguh Santoso dan Maruto Umar Basuki). Pengeluaran pemerintah dianggap sebagai komponen pengeluaran agregat yang otonom (G0) karena pendapatan nasional bukan merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi keputusan pemerintah dengan menentukan anggaran belanjanya. Ada tiga faktor penting yang menentukan pengeluaran pemerintah yaitu : pajak yang diharapkan akan diterima, pertimbangan politik, dan persoalan ekonomi yang dihadapi (Sadono Sukirno, 2005).

Kebijakan fiskal adalah merupakan langkah-langkah dari pemerintah untuk membuat perubahan dalam sistem pajak atau pembelanjaan nya dengan tujuan agar dapat mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi (Sadono Sukirno 2003). Kebijakan fiskal memiliki dua prioritas, yang pertama adalah mengatasi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan masalah APBN lainnya. Defisit APBN terjadi apabila penerimaan pemerintah lebih kecil dari pada pengeluarannya. Dan yang kedua adalah mengatasi stabilitas ekonomi makro yang terkait dalam pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, kesempatan kerja dan neraca pembayaran (Tulus TH Tambunan, 2006)

Yarbrough (2002) mengemukakan bahwa sistem nilai tukar yang dianut dan derajat aliran modal internasional merupakan penentu utama dalam efektifitas kebijakan fiskal dan moneter dalam perekonomian terbuka. Perbedaan sistem kurs yang digunakan dalam suatu perekonomian akan sangat mempengaruhi efektifitas kebijakan ekonomi dan penentuan kurs mata uang.

Menurut kaum klasik, kebijakan fiskal hanya menaikkan suku bunga dan tidak menimbulkan suatu perubahan terhadap pendapatan nasional (crowding out) yaitu proses dalam perekonomian dimana kenaikan pengeluaran pemerintah diikuti oleh menurunnya investasi swasta tersebut diakibatkan oleh kenaikan suku bunga (Mankiw,1997).

Inflasi adalah fenomena ekonomi yang tak pernah basi dalam sejarah panjang ekonomi. Inflasi menjadi pembahasan kursial karena mempunyai dampak yang amat luas dalam perekonomian makro. Inflasi yang tinggi akan menyebabkan memburuknya distribusi pendapatan, menambah angka kemiskinan, mengurangi

tabungan domestik, menyebabkan defisit neraca perdagangan, menggelembungkan besaran utang luar negeri serta menimbulkan ketidakstabilan politik. Mengingat begitu kursialnya inflasi ini, Bank sentral dalam tugasnya menjaga stabilitas ekonomi menetapkannya sebagai tujuan utama dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia telah menyusun berbagai kerangka kebijakan moneter yang menjadi pedoman dalam langkah stabilisasi. Kebijakan ini tentunya selalu disesuaikan dengan perkembangan dinamika ekonomi nasional dan global beberapa tahun terakhir ini telah memfokuskan perhatian Bank Indonesia kepada masalah pengendalian inflasi. Hal ini juga didukung oleh perkembangan teori ekonomi dalam literature dan temua di beberapa negara bahwa kebijakan moneter dalam jangka panjang berpengaruh pada inflasi, bukan pertumbuhan ekonomi (Perry Warjiyo dan Solikin,2004)

Stabilitas ekonomi makro dapat dilihat dari pengaruh terhadap guncangan kebijakan harga pangan ataupun variabel lainnya terhadap variabel kunci indikator makro. Apabila suatu guncangan menimbulkan fluktuasi yang besar pada variabel ekonomi makro, maka dapat dikatakan stabilitas ekonomi makro rentan terhadap guncangan tersebut. Sebaliknya, jika dampaknya menimbulkan fluktuasi yang kecil, maka dapat dikatakan stabilitas ekonomi makro yang stabil (N Ilham dan Hermanto S). Variabel ekonomi makro yang menjadi isu utama adalah pertumbuhan output, laju inflasi, pengangguran dan neraca pembayaran. Variabel ekonomi makro saling terkait melalui pasar barang, pasar uang, pasar tenaga kerja, dan pasar saham yang membentuk keseimbangan internal (macro equilibrium) dan keseimbangan eksternal (Ilham dan Siregar).

a. Pengaruh tingkat suku bunga terhadap inflasi

Hubungan diantar tingkat suku bunga dengan inflasi dapat diketahui melalui pengertian tingkat bunga nominal. Tingkat bunga pasar yang berjalan dinamakan dengan tingkat bunga nominal (i) dan didapat hubungan:

$$I = r + \pi, r = \text{tingkat bunga riil}$$

Hubungan seperti ini dikenal sebagai Fisher Effect (one for one relation) yang menunjukkan 1% perubahan inflasi akan menyebabkan 1% perubahan tingkat bunga nominal (Herlambang, 2002).

Dari persamaan diatas dapat diubah menjadi:

$$\pi = I - r$$

Laju inflasi sama dengan tingkat bunga nominal dikurangi dengan tingkat bunga riil. Jadi ada hubungan antara tingkat bunga dengan percepatan inflasi.

b. Pengaruh jumlah uang beredar terhadap inflasi

Pertumbuhan uang yang meningkat akan mengakibatkan terjadinya inflasi yang tinggi. Ketika uang beredar terus bertumbuh pada tahun-tahun berikutnya, perekonomian akan terus bergerak ke tingkat harga yang lebih tinggi dan lebih tinggi. Selama uang beredar tumbuh, proses ini akan terus berlanjut dan inflasi akan terjadi (Mishkin, 2009).

Penjelasan yang menggambarkan bagaimana tingkat harga ditentukan dan berubah sesuai dengan perubahan jumlah uang beredar disebut teori kuantitas uang (Quantity Theory Of Money). Berdasarkan teori ini, jumlah uang yang beredar dalam

suatu perekonomian menentukan nilai uang, sementara pertumbuhan jumlah uang beredar merupakan sebab utama terjadinya inflasi.

Dalam teori kuantitas uang, menjelaskan bahwa pengaruh jumlah uang yang beredar terhadap perekonomian, dihubungkan dengan variabel harga dan output. Hubungan diantara jumlah uang beredar, output dan harga dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\mathbf{M.V = P.Y}$$

Dimana :

M = Jumlah uang beredar (Money)

V = Perputaran uang (Velocity)

P = Tingkat indeks harga yang berlaku (Price)

Y = Tingkat pendapatan (Output)

Velocity of money (perputaran uang) mengukur tingkat dimana uang bersirkulasi dalam perekonomian (Mankiw, 2003), atau dapat dikatakan mengukur kecepatan perpindahan uang dari satu orang ke orang lainnya. Velocity of money dapat dihitung melalui pembagian antara Gross Domestic Product (GDP) nominal dengan jumlah uang beredar. Secara matematis, dapat ditulis sebagai berikut :

$$\mathbf{V = (P.Y)/M}$$

Persamaan di atas dianggap sebagai suatu defenisi yang menunjukkan perputaran V sebagai rasio GDP nominal, PY terhadap kuantitas uang M. Jika satu atau lebih variabel berubah, maka satu atau lebih variabel lainnya juga harus berubah untuk menjaga kesamaan. Misalnya, jika jumlah uang beredar meningkat maka

akibatnya dapat dilihat dari ketiga variabel lainnya yaitu harga harus naik, kuantitas output harus naik, atau kecepatan perputaran uang harus turun.

Secara teoritis, hubungan antara tingkat inflasi dan tingkat harga equilibrium yang digambarkan dalam quantity theory of money dapat dijelaskan sebagai berikut (Mankiw,2003) :

1. Velocity of monet relatif stabil pada jangka panjang
2. Velocity relatif stabil, saat Bank Sentral mengubah jumlah uang beredar (M), terjadi perubahan proposional dalam nilai output nominal (PY).
3. Besarnya output barang dan jasa (Y) ditentukan oleh supply faktor produksi dan teknologi produksi. Secara terbatas, karena uang adalah netral, uang tidak mempengaruhi besaran output.
4. Pada output (Y) ditentukan oleh supply faktor dan teknologi; saat Bank Sentral mengubah jumlah uang beredar (M) dan menyebabkan perubahan proposional terhadap nilai output nominal (PY), perubahan akan tercermin dalam tingkat harga. Maka, teori ini menunjukkan bahwa tingkat adalah proposional terhadap jumlah uang beredar.
5. Tingkat inflasi ditunjukkan oleh perubahan persentase dalam tingkat harga, maka meningkatnya jumlah uang beredar akan menyebabkan inflasi.

Teori kuantitas dikembangkan oleh Irving Fisher mengatakan bahwa “pada hakikatnya berpendapat bahwa perubahan dalam jumlah uang beredar akan menimbulkan perubahan yang sama cepatnya ke atas harga-harga”. Apabila jumlah uang beredar bertambah sebanyak 5% maka tingkat harga-harga juga akan bertambah

banyak 5%. Atau sebaliknya, apabila jumlah uang beredar berkurang sebesar 5% maka tingkat harga-harga akan berkurang 5% (Sukirno,2002).

Jumlah uang beredar berpengaruh positif terhadap inflasi. Peningkatan jumlah uang beredar yang berlebihan dapat mendorong peningkatan harga melebihi tingkat yang diharapkan sehingga dalam jangka panjang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi. Ini berarti terdapat korelasi positif antara pertumbuhan uang (jub) dan inflasi, yang dapat dijadikan prediksi teori kuantitas bahwa pertumbuhan uang yang tinggi mengarah pada inflasi yang tinggi sehingga pertumbuhan dalam money supply menentukan tingkat inflasi.

c. Pengaruh penerimaan pajak terhadap PDB

Pengaruh secara langsung dari pungutan pajak ialah terhadap pendapatan disposibel. Pendapatan disposibel merupakan hasil pendapatan pribadi dikurang dengan pajak. Ketika pungutan pajak dinaikkan, maka pendapatan disposibel menjadi turun. Dengan menurunnya pendapatan disposibel maka konsumsi akan ikut menurun. Anjloknya konsumsi akan berdampak pada turunnya pendapatan nasional equilibrium. Demikian pula ketika pungutan pajak diturunkan maka konsumsi relative menjadi naik. Naiknya komponen ini dapat menaikkan pendapatan nasional. Perhitungan pendapatan nasional dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = C + I + G + (X-M)$$

Dimana :

Y = GDP

C = Konsumsi

I = Investasi

G = Pengeluaran pemerintah

$X-M$ = Total bersih ekspor atau ekspor neto

Secara matematis, pengaruh pajak terhadap konsumsi dapat dinyatakan dengan persamaan berikut :

$$C = C (Y-T)$$

T = Pajak

Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi direpresentasikan dengan nilai GDP. Demikian setiap kali peningkatan pungutan pajak akan menurunkan nilai konsumsi. Hanya karena konsumsi berkorelasi positif dengan Y atau GDP, maka setiap peningkatan pajak akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah. Artinya peningkatan pungutan pajak secara langsung meningkatkan pendapatan pemerintah. Dengan demikian, jika pendapatan dari pajak ini akan digunakan untuk pengeluaran yang berpengaruh terhadap nilai komponen pengeluaran pemerintah atau G , maka peningkatan pungutan pajak dapat berpengaruh terhadap peningkatan nilai G . Dalam hal ini, pungutan pajak berkorelasi dengan komponen G . Karena komponen G berkorelasi positif dengan GDP, maka setiap kenaikan pungutan pajak dapat meningkatkan kenaikan GDP.

Penambahan pungutan pajak akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi jika nilai konsumsi, investasi, dan neto ekspor minimal tetap. Pajak akan menurunkan konsumsi, dilainpihak pajak menaikkan pendapatan pemerintah. Karena nilai uang yang dikeluarkan dari rumah tangga maupun masyarakat untuk pajak adalah samadengan pendapatan pemerintah dari pajak, maka nilai pengeluaran pemerintah

yang bersumber dari pajak paling besar sama atau lebih kecil dari nilai pajak itu sendiri.

d. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDB

Ada beberapa sektor perekonomian yang umumnya terpengaruh oleh besar atau kecilnya pengeluaran negara, antara lain :

1. Sektor Produksi

Pengeluaran dari negara secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi produksi barang dan jasa. Dipandang secara agregat pengeluaran Negara merupakan factor produksi (money), melengkapi faktor – faktor produksi yang lain (man, machine, material, method, management). Pengeluaran pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa dapat mempengaruhi secara langsung pada produksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pemerintah akan sangat berpengaruh secara tidak langsung terhadap perekonomian, karena pendidikan akan menghasilkan SDM yang lebih berkualitas. Dengan SDM yang berkualitas produksi akan meningkat.

2. Sektor Distribusi

Dalam pengeluaran negara secara langsung ataupun tidak langsung berpengaruh terhadap sektor distribusi barang dan jasa. Misalnya, subsidi yang diberikan oleh masyarakat menyebabkan masyarakat yang kurang mampu dapat menikmati barang/jasa yang dibutuhkan, misalnya subsidi listrik, pupuk, BBM, dll. Pengeluaran pemerintah untuk biaya pendidikan SD – SLTA membuat masyarakat kurang mampu dapat menikmati pendidikan yang lebih baik (paling

tidak sampai tingkat SLTA). Dengan pendidikan yang lebih baik, diharapkan masyarakat tersebut dapat meningkatkan taraf hidupnya dimasa yang akan datang. Ketika pemerintah tidak mengeluarkan dana untuk keperluan tersebut, maka distribusi dari pendapatan, barang dan jasa dapat berbeda. Hanya masyarakat mampu saja yang akan menikmati tingkat kehidupan yang lebih baik, sementara masyarakat kurang mampu tidak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya.

3. Sektor Konsumsi Masyarakat

Dalam pengeluaran negara secara langsung ataupun tidak langsung berdampak terhadap sektor konsumsi masyarakat atas barang dan jasa. Dengan adanya pengeluaran pemerintah untuk subsidi, tidak hanya menyebabkan masyarakat yang kurang mampu dapat menikmati suatu barang/jasa, namun juga menyebabkan masyarakat yang sudah mampu akan mengkonsumsi produk/jasa lebih banyak lagi. Kebijakan pengurangan subsidi, misalnya BBM akan menyebabkan konsumsi masyarakat terhadap BBM turun.

4. Sektor Keseimbangan Perekonomian

Untuk mencapai target – target peningkatan PDB, pemerintah dapat mengatur alokasi dan tingkat pengeluaran Negara. Contohnya dengan mengatur tingkat pengeluaran Negara yang tinggi (untuk sektor-sektor tertentu), pemerintah dapat mengatur tingkat employment (menuju full employment). Apabila target penerimaan tidak memadai untuk membiayai pengeluaran tersebut, pemerintah dapat membiayai dengan pola defisit anggaran.

B. Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian sebelumnya dalam tabel:

Tabel 2.1 Review Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Model	Hasil
1	Hartarto (2014) “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inflasi Di Indonesia Tahun 2008-2012	Inflasi Jumlah uang beredar Pdb Kurs Suku bunga	OLS (Ordinary Least Square)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel suku bunga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap inflasi.
2	Adrian sutawijaya (2012) “Pengaruh Faktor-Faktor Ekonomi Terhadap Inflasi di Indonesia”	Suku bunga Investasi Jumlah uang beredar Inflasi Nilai tukar	OLS (Ordinary Least Square)	Hasil regresi menunjukkan $R_2=0.837$ maka suku bunga, jub, investasi, nilai tukar secara bersama sangat berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia sebesar 83,7%
3	Angandrowa Gulo (2008) “Analisis Pengaruh Aspek Moneter Dn Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”	Pertumbuhan ekonomi Pengeluaran pemerintah Penerimaan pajak Suku Bunga Jub	OLS (Ordinary Least Square)	Hasil estimasi menunjukkan bahwa aspek fiskal dan aspek moneter bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
4	Arshad Ragandhi “Pengaruh Pendapatan Nasional Inflasi dan Suku Bunga Deposito Terhadap Konsumsi	Konsumsi Pendapatan nasional Inflasi Suku bunga deposito	ECM (Error Correction Model)	Model regresi menunjukkan $=0.9363$ yang artinya bahwa pendapatan nasional, sbd ,inflasi mempengaruhi

	Masyarakat di Indonesia”			konsumsi masyarakat sebesar 93,63%
5	Teguh Santoso, Maruto Umar Basuki, Universitas Diponegoro “Dampak Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Perekonomian Indonesia: Aplikasi Model Mundell-Fleming	Pdb Nilai tukat Inflasi Tingkat suku bunga Investasi Konsumsi	TSLS (Two stage least square)	Pdb yang mencerminkan output dari sisi pengeluaran agregat dipengaruhi secara positif terhadap variabel konsumsi, investasi dan jumlah uang beredar.
6	Rizki E. Wimand (2011) “Dampak Depresiasi Nilai Tukar dan Pertumbuhan Uang Beredar Terhadap Inflasi” Aplikasi Threshold Model	Inflasi Nilai tukar Jumlah uang beredar	Threshold Effect	Nilai Threshold dari depresiasi nilai tukar = 8.4% untuk pertumbuhan uang beredar ada dua nilai yaitu 7.1% dan 9.8% artinya efek dari ketiga regime ini berbeda secara signifikan.
7	Catona Mactra, Fakhruddin “Analisis Efek Kebijakan Moneter Terhadap Output di Indonesia”	Pdb Inflasi Nilai tukar	VAR	Diketahui bahwa variabel produk domestik bruto, inflasi dan nilai tukar saling berhubungan satu sama lain.
8	Theodore Manuela Langi, Vecky Masinambow, Hanly Siwu (2014) “Analisis pengaruh suku bunga ,jumlah uang beredar, dan Tingkat Kurs Terhadap Inflasi di	Inflasi Suku bunga Jumlah uang beredar Kurs	ECM (Error Correction Model)	Suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi sedangkan jub dan kurs berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap inflasi

	Indonesia			
9	Yassirli Amrini, Hasdi Aimon, Efrizal Sofyan. “Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Inflasi dan Perekonomian di Indonesia”	Jub Suku bunga Kurs Inflasi	TSLS	Jumlah uang beredar, suku bunga, kurs dan perekonomian berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia.
10	Michael Untono (2015) “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Nilai tukar, indeks DJIA dan Harg minyak dunia Terhadap IHSG”	Pertumbuhan ekonomi Inflasi Nilai tukar Ihsg	Regresi linier berganda	Pertumbuhan ekonomi secara parsial tidak berpengaruh positif signifikan, inflasi berpengaruh negative, DJIA berpengaruh positif terhadap IHSG.
11	Asyulinda, SyamsulAmar,nHasdi Aimon “Pengaruh inflasi,Kebijakan fiskal dan moneter terhadap Pengangguran di indonesia”	Pengeluaran Pemerintah Pajak Pengangguran Inflasi Jumlah Uang Beredar Suku Bunga	jalur (Path Analysis)	Tingginya jumlah uang beredar akan mempengaruhi tingkat inflasi, karena semakin banyak uang yang dipegang masyarakat dapat mendorong terjadinya inflasi, Permintaan uang akan memiliki hubungan negatif terhadap output
12	Endri “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inflasi Di Indonesia”	Inflasi GDP SBI	ECM (Error Corretion dan Model Analysis Cointegration	Dalam jangka panjang, inflasi secara signifikan dipengaruhi oleh kebijakan moneter (dalam hal ini

			Analysis	adalah tingkat SBI) besar nya ouput gap dan nilai tukar.
13	Farah Fauziyah (2015) “Kebijakan Moneter Dalam Mengatasi Inflasi Di Indonesia”	Inflasi Suku Bunga	Autoregressive Vector (VAR)	Hasil IRF menunjukkan bahwa pada konvensional (Model I) variabel SBI memberikan dampak negatif dan obligasi memberikan dampak positif terhadap inflasi (IHK), sedangkan pada sisi syariah (Model II) memberikan dampak positif dalam menurunkan inflasi.
14	Iwan Setiawan (2009) “Analisis Dampak Kebijakan Moneter terhadap Perkembangan Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”	Jumlah uang beredar Inflasi Nilai tukar rupiah	Structural Vector Autoregression (SVAR)	jumlah uang beredar dan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap USD signifikan berpengaruh terhadap peningkatan kondisi inflasi di Indonesia.
15	Roshinta Puspitaningrum, Suhadak, Zahro Z.A(2014) “Pengaruh Tingkat Infalsi, Tingkat Suku Bunga SBI, dan Pertumbuhan	Inflasi SBI Pertumbuhan ekonomi Nilai tukar	Regresi linear berganda	Hasil uji simultan (uji F), menunjukkan bahwa tingkat inflasi, tingkat suku bunga SBI, dan pertumbuhan ekonomi secara

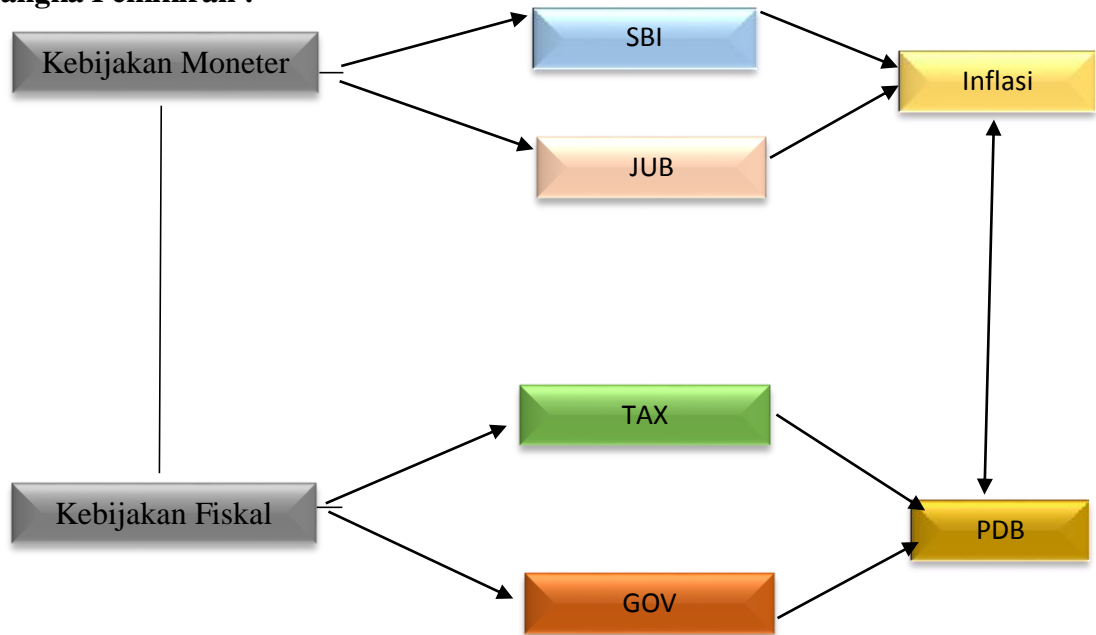
	Ekonomi Terhadap Nilai Tukar Rupiah”	Rupiah		simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar rupiah.
16	Suramaya Suci Kewal (2012) “Pengaruh inflasi, Suku Bunga, Kurs dan Pertumbuhan PDB Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan”	Inflasi Suku bunga Kurs PDB	Regresi linier berganda	Secara simultan diperoleh nilai F sebesar 5.231 dengan $p=0.001$ maka terdapat pengaruh inflasi, suku bunga, kurs rupiah, PDB secara simultan terhadap IHSG dan BEI
17	Aziz Septiati, Mawardi, Mohammad Ade Khairur Rizki(2016) “Pengaruh Inflasi dan Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”	Pertumbuhan Ekonomi Inflasi Pengangguran	Ordinary Least Squares (OLS)	Nilai Adjusted R2 Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,581602 hal ini berarti 58,16% dijelaskan oleh variabel Inflasi dan Pengangguran.
18	Enggal Sriwardiningsih “Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Suku Bunga, Inflasi, dan Kebijakan Fiskal Terhadap Investasi di Indonesia”	Pertumbuhan ekonomi Suku bunga Inflasi, Investasi	Regresi Linier Berganda	Pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan inflasi memberi dampak signifikan terhadap investasi, terutama pada kegiatan PMA; sedangkan kegiatan PMDN, pengaruh kebijakan ini tidak nyata. Hanya variabel suku bunga

				dalam model yang signifikan mempengaruhi investasi penanaman modal dalam negeri
19	Ari Mulianta Ginting (2016) “Analisis Determinan Inflasi di Indonesia”	Inflasi Jumlah uang beredar Konsumsi, Kurs.	VECM	Nilai tukar, jumlah uang beredar dan konsumsi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap inflasi. Sedangkan variabel GDP memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap inflasi
20	Ndari Surjaningsih G. A. Diah Utari Budi Trisnanto(2012) “Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Output Dan Inflasi”	Inflasi Output Pajak Pengeluaran pemerintah	Vector Error Correction Model (VECM)	Hasil empiris menunjukkan bahwa terdapat hubungan kointegrasi antara pengeluaran pemerintah dan pajak terhadap output dalam jangka panjang.

C. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ada namanya kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah hubungan timbal balik antara satu variabel dengan variabel lainnya secara parsial maupun simultan. Dimana dalam penelitian ini menggunakan 1 metode sehingga menggunakan 1 kerangka yaitu simultan .

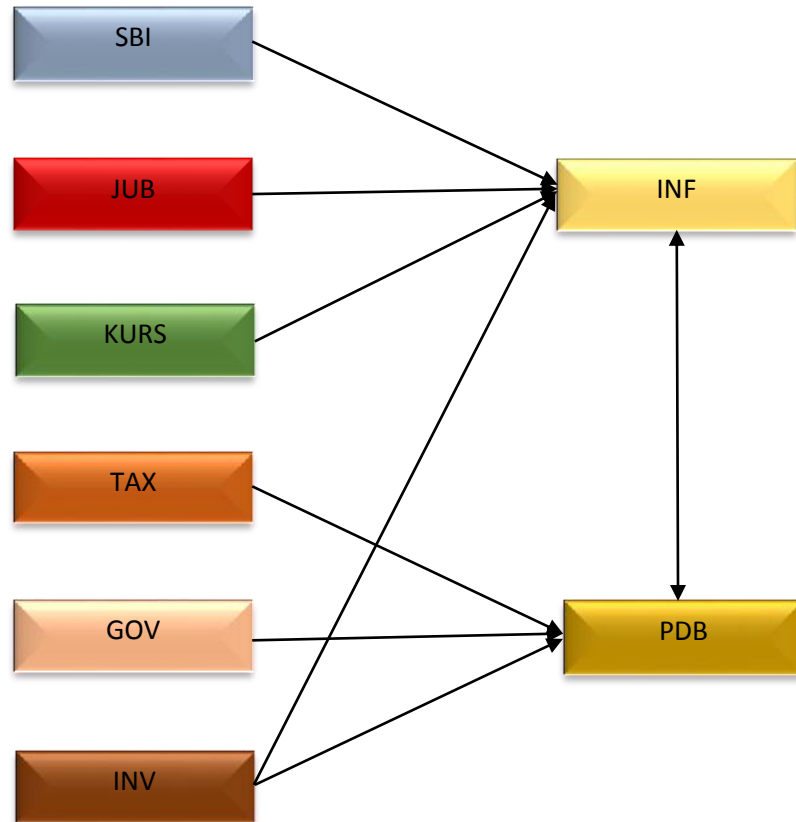
Kerangka Pemikiran :



Gambar 2.1

Kerangka Konseptual :

a. Simultan



Gambar 2.2

Interaksi antar variabel :

- a. Hubungan suku bunga , jumlah uang beredar kurs dan inflasi dapat dijelaskan yaitu naiknya tingkat suku bunga menyebabkan meningkatnya tabungan masyarakat, sehingga jumlah uang beredar di masyarakat akan berkurang dan hal ini dapat menstabilkan perekonomian terutama menstabilkan tingkat inflasi, dengan demikian nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain dapat meningkat.
- b. Hubungan penerimaan pajak dengan pengeluaran pemerintah dapat dijelaskan bahwa faktor yang penting untuk menentukan besarnya pengeluaran

pemerintah adalah pajak. Semakin banyak jumlah pajak yang dikumpulkan, semakin banyak pula perbelanjaan pemerintah yang akan dilakukan (Sukirno,2010). Upaya untuk meningkatkan suatu penerimaan negara dalam sektor pajak sangatlah penting karena dana yang dihimpun berasal dari rakyat atau berasal dari pemerintah (Waluyo,2007). Menurut Mankiw (2006) pemerintah bisa mendanai pengeluarannya dalam 3 cara, yaitu pemerintah bisa meningkatkan penerimaan lewat pajak seperti pajak penghasilan perorangan dan pajak pendapatan perusahaan, pemerintah bisa dengan mudah mencetak uang. Menurut Narayan (2005) pengeluaran pemerintah meningkatkan penerimaan pemerintah.

D. Hipotesis

Teori empirik yang dikemukakan oleh Sugiyono (2003) sebagai berikut: Hipotesis adalah suatu proposisi, kondisi atau prinsip untuk sementara waktu dianggap benar dan barangkali tanpa keyakinan supaya bisa ditarik suatu konsekuensi logis dan dengan cara ini kemudian diadakan pengujian tentang kebenarannya dengan menggunakan data empiris hasil penelitian. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah : Teliti Interaksi Moneter dan Fiskal Terhadap Guncangan Output dan Inflasi di Indonesia.

1. Suku bunga , jumlah uang beredar, kurs, investasi dan Pdb berpengaruh secara simultan terhadap inflasi.
2. Pajak, pengeluaran pemerintah, investasi dan inflasi berpengaruh secara simultan terhadap Pdb.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian asosiatif/kuantitatif. Menurut Rusiadi (2013:14): Penelitian asosiatif/kuantitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui derajat hubungan dan pola/bentuk pengaruh antar dua variabel atau lebih, dimana dengan penelitian ini maka akan dibangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.

Untuk itu dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik analisa simultan untuk melihat pengaruh antar variabel-variabel yang menjadi pilihan dalam penentuan sarana operasional dalam usaha menstabilkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi melalui jumlah uang beredar, suku bunga, kurs, investasi tax, dan government. Dan setelah itu, kita akan bisa melihat variabel-variabel manakah yang mempunyai peran besar terhadap inflasi dan PDB dalam fluktuasi ekonomi. Idealnya, variabel yang mempunyai keeratan hubungan yang lebih dekatlah yang seharusnya dipilih oleh otoritas moneter untuk dijadikan sebagai alat instrumen pengandali yang lebih efektif. Dengan begitu kita bisa menentukan apakah pilihan variable yang diambil saat ini sudah tepat atautkah sebaliknya. Variabel yang digunakan adalah suku bunga, jumlah uang beredar, kurs, investasi, tax, dan government. Sedangkan teknik penulisan penelitian ini adalah menggunakan teknik studi literatur, yaitu menggali dan menganalisa berbagai informasi yang terkait dalam berbagai buku dan bahan

pustaka yang lain. Sedangkan untuk data-data moneter, penulis olah dari data yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia dan BPS.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Indonesia. Waktu Penelitian dilakukan mulai dari bulan Maret 2019 sampai dengan Okt 2019.

Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian

NO	AKTIVITAS	BULAN/TAHUN														
		Oct-18	Mar-19	Mei-19	Juli-19	Ags-19	Sep-19	Okt-19								
1	Risetawal/Pengajuan Judul	■														
2	Penyusunan Proposal		■	■	■	■	■									
3	Seminar Proposal						■									
4	Perbaikan Acc Proposal							■	■							
5	Pengolahan Data									■						
6	Penyusunan Skripsi										■					
7	Bimbingan Skripsi											■	■			
8	Meja Hijau															■

Sumber : Penulis (2019)

C. Defenisi Operasional Variabel

Berdasarkan pada masalah dan hipotesis yang akan diuji, maka variabel-variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Defenisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Pengukuran	Skala
1	Inflasi	Tingkat kenaikan harga	Indek harga konsumen	Rasio
2	Pruduk Domestik Bruto (PDB)	Total pendapatan masyarakat satu tahun	Milyar Rp	Rasio
3	Suku Bunga	Biaya atas pinjaman	Persen	Rasio
4	Jumlah Uang Beredar (JUB)	Uang yang beredar di masyarakat	Milyar Rp	Rasio
5	Kurs	Nilai tukar mata uang	US\$	Rasio
6	Pajak (TAX)	Pungutan wajib yang	Persen	Rasio

		dibayar rakyat untuk Negara		
7	Pengeluaran Pemerintah (GOV)	Alokasi anggaran yg disusun dalam APBN dan APBD	Milyar Rp	Rasio
8	Investasi	Penanaman modal	Milyar Rp	Rasio

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari badan Pusat Statistik (BPS) pada www.bps.go.id dan Bank Dunia www.worldbank.com

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dan mengolah data dari informasi terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dan diolah dari badan pusat statistik (BPS), World Bank dan Bank Indonesia dari tahun 2001-2017 (17 Tahun).

F. Teknik Analisis Data

Model analisis yang digunakan adalah sistem persamaan Simultan sebagai berikut:

1. Model analisis persamaan simultan

$$\text{LOG(INF)} = C(11) * \text{LOG(SBI)} + C(12) * \text{LOG(JUB)} + C(13) * \text{LOG(KURS)} + C(14) * \text{LOG(INV)} + C(15) * \text{LOG(PDB)} + \varepsilon_1$$

Dimana :

INF = Inflasi (Persen)

SBI = Suku Bunga Indonesia (Persen)

JUB = Jumlah Uang Beredar (Milyar)

PDB = Produk Domestik Bruto (Milyar)

KURS = Nilai Tukar Mata Uang (US\$)

INV = Investasi (Milyar Rp)

C(11), C(12), (13), (14), (15) = konstanta

$\alpha_0-\alpha_3$ = koefisien regresi

ε_1 = term error

$$\text{LOG(PDB)} = \text{C(21)} * \text{LOG(TAX)} + \text{C(22)} * \text{LOG(GOV)} + \text{C(23)} * \text{LOG(INV)} + \text{C(24)} * \text{LOG(INF)} + \varepsilon_2$$

Dimana :

INF = Inflasi (Persen)

TAX = Penerimaan Pajak (Persen)

GOV = Pengeluaran Pemerintah (Milyar Rp)

PDB = Produk Domestik Bruto (Milyar Rp)

INV = Investasi (Milyar Rp)

C(21), C(22), (23), (24) = konstanta

$\alpha_0, \alpha_1, \alpha_3$, = koefisien regresi

ε_2 = term error

Asumsi dasar dari analisis regresi adalah variabel di sebelah kanan dalam persamaan tidak berkorelasi dengan *disturbance terms*. Jika asumsi tersebut tidak terpenuhi, *Ordinary Least Square (OLS)* dan *Weighted Least Square* menjadi bias dan

tidak konsisten. Ada beberapa kondisi dimana variabel independen berkorelasi dengan *disturbances*. Contoh klasik kondisi tersebut, antara lain :

1. Ada variabel endogen dalam jajaran variabel independen (variabel di sebelah kanan dalam persamaan).
2. *Right-hand-side variables* diukur dengan salah. Secara ringkas, variabel yang berkorelasi dengan residual disebut variabel endogen (*endogenous variables*) dan variabel yang tidak berkorelasi dengan nilai residual adalah variabel eksogen (*exogenous* atau *predetermined variables*).

Pendekatan yang mendasar pada kasus dimana *right hand side variables* berkorelasi dengan residual adalah dengan mengestimasi persamaan dengan menggunakan *instrumental variables regression*. Gagasan dibalik *instrumental variables* adalah untuk mengetahui rangkaian variabel, yang disebut instrumen, yang (1) berkorelasi dengan *explanatory variables* dalam persamaan dan (2) tidak berkorelasi dengan *disturbances*-nya. Instrumen ini yang menghilangkan korelasi antara *right-hand-side variables* dengan *disturbance*. Gujarati, (1999) mengatakan bahwa dalam persamaan simultan sangat besar kemungkinan variabel endogen berkorelasi dengan *error term*, dalam hal ini variabel *leverage* berkorelasi dengan e_1 , dan variabel dividen berkorelasi dengan e_2 . Dengan kondisi tersebut maka analisis dengan menggunakan regresi biasa (OLS) sangat potensial untuk menghasilkan taksiran yang bias dan tidak konsisten. Selanjutnya dikatakan bahwa metode 2 SLS lebih tepat digunakan untuk analisis simultan, mengingat dalam analisis ini semua variabel diperhitungkan sebagai suatu sistem secara menyeluruh.

Two-stage-least-square (2SLS) adalah alat khusus dalam *instrumental variables regression*. Seperti namanya, metode ini melibatkan 2 tahap OLS.

Stage 1. Untuk menghilangkan korelasi antara variabel endogen dengan *error term*, dilakukan regresi pada tiap persamaan pada variabel *predetermined variables* saja (*reduced form*). Sehingga di dapat *estimated value* tiap-tiap variabel endogen.

Stage 2. Melakukan regresi pada persamaan aslinya (*structural form*), dengan menggantikan variabel endogen dengan *estimated value*-nya (yang didapat dari *1st stage*).

a. Identifikasi Simultanitas

Untuk melihat hubungan antara variabel endogen maka langkah pertama dilakukan identifikasi persamaan. Identifikasi ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah persamaan tersebut berada dalam salah satu kondisi berikut ini: *under identified* (tidak bisa diidentifikasi), *exactly-identified* (tepat diidentifikasi) atau *over-identified*. Agar metode 2SLS dapat diaplikasikan pada sistem persamaan, maka persyaratan identifikasi harus memenuhi kriteria tepat (*exactly identified*) atau *over identified* (Koutsoyiannis, 1977). Disamping itu, metode 2SLS memiliki prosedur lain, antara lain: tidak ada korelasi residual terms (*endogenous variables*), *Durbin-Watson test* menyatakan tidak ada variabel di sisi kanan yang berkorelasi dengan *error terms*. Akibat dari autokorelasi terhadap penaksiran regresi adalah :

- a. Varian residual (*error term*) akan diperoleh lebih rendah daripada semestinya yang mengakibatkan R² lebih tinggi daripada yang seharusnya.

- b. Pengujian hipotesis dengan menggunakan statistik t dan statistik F akan menyesatkan.

Disamping itu harus dipastikan bahwa tidak ada heteroditas, untuk itu dilakukan uji asumsi klasik untuk menemukan apakah ada autokorelasi dan heteroskedastisitas. Hasil uji asumsi klasik menyatakan bahwa korelasi nilai sisa (*residual value*) antar variabel endogen sangat kecil atau dapat dikatakan tidak ada autokorelasi serta dibuktikan bahwa tidak ada heteroskedastisitas, sehingga metode 2SLS diaplikasikan. Kondisi over identifikasi menyatakan bahwa (untuk persamaan yang akan diidentifikasi) selisih antara total variabel dengan jumlah variabel yang ada dalam satu persamaan (endogen dan eksogen), harus memiliki jumlah yang minimal sama dengan jumlah dari persamaan dikurangi satu.

Sebelum memasuki tahap analisis 2SLS, setiap persamaan harus memenuhi persyaratan identifikasi. Suatu persamaan dikatakan *identified* hanya jika persamaan tersebut dinyatakan dalam bentuk statistik unik, dan menghasilkan taksiran parameter yang unik (Sumodiningrat, 2001). Berdasarkan hal ini Gujarati, (1999) mengatakan bahwa untuk memenuhi syarat tersebut maka suatu variabel pada persamaan satu harus tidak konsisten dengan persamaan lain. Dalam hal ini identifikasi persamaan dapat dilakukan dengan memasukkan atau menambah, atau mengeluarkan beberapa variabel eksogen (atau endogen) ke dalam persamaan (Sumodiningrat, 2001). Kondisi *identified* dibagi menjadi dua yaitu: *exactly identified* dan *over identified*. Penentuan kondisi *exactly identified* maupun *over identified* dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$K-k < m-1$: disebut *under identification*

$K-k = m-1$: disebut *exact identification*

$K-k > m-1$: disebut *over identification*

dimana ;

K = jumlah variabel eksogen *predetermined* dalam model

m = jumlah variabel eksogen *predetermined* dalam persamaan

k = jumlah variabel endogen dalam persamaan.

Berdasarkan kriteria diatas maka identifikasi persamaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$\text{LOG(INF)} = C(11) * \text{LOG(SBI)} + C(12) * \text{LOG(JUB)} + C(13) * \text{LOG(KURS)} + C(14) * \text{LOG(INV)} + C(15) * \text{LOG(PDB)} + \varepsilon_1$$

$K= 6, k = 5, \text{ dan } m = 2$

$$\text{LOG(PDB)} = C(21) * \text{LOG(TAX)} + C(22) * \text{LOG(GOV)} + C(23) * \text{LOG(INV)} + C(24) * \text{LOG(INF)} + \varepsilon_2$$

$K= 6, k = 4, \text{ dan } m = 2$

Berdasarkan formula di atas, keempat persamaan dapat diuji identifikasinya sebagai berikut :

Tabel 3.3 Uji identifikasi persamaan

Persamaan	$K-k$	$m-1$	Hasil	Identifikasi
INFLASI	6-5	2-1	1=1	<i>exact identification</i>
PDB	6-4	2-1	2>1	<i>over identification</i>

1. Two-Stage Least Squares

Metode analisis menggunakan Two-Stage Least Squares atau model regresi dua tahap, yaitu :

Tahap 1 : Persamaan *Reduce Form*

$$\text{LOG(INF)} = C(11) * \text{LOG(SBI)} + C(12) * \text{LOG(JUB)} + C(13) * \text{LOG(KURS)} + C(14) * \text{LOG(INV)} + C(15) * \text{LOG(PDB)} + \varepsilon_1$$

Tahap 2 :Memasukan nilai estimasi Inflasi dari persamaan reduce form ke persamaan awal, yaitu :

$$\text{LOG(PDB)} = C(21) * \text{LOG(TAX)} + C(22) * \text{LOG(GOV)} + C(23) * \text{LOG(INV)} + C(24) * \text{LOG(INF)} + \varepsilon_2$$

b. Uji Kesesuaian (*Test Goodness of Fit*)

Estimasi terhadap model dilakukan dengan menggunakan metode yang tersedia pada program statistik Eviews versi 5.1. Koefisien yang dihasilkan dapat dilihat pada output regresi berdasarkan data yang di analisis untuk kemudian diinterpretasikan serta dilihat signifikansi tiap-tiap variabel yang diteliti yaitu :

- a. R^2 (koefisien determinasi) bertujuan untuk mengetahui kekuatan variabel bebas (independent variable) menjelaskan variabel terikat (dependent variabel).
- b. Uji parsial (t-test), dimaksudkan untuk mengetahui signifikansi statistik koefisien regresi secara parsial. Jika $t_{hit} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.
- c. Uji serempak (F-test), dimaksudkan untuk mengetahui signifikansi statistik koefisien regresi secara serempak. Jika $F_{hit} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

c. Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

Setelah dilakukan pengujian regresi, maka dilakukan evaluasi. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah penggunaan model regresi linier berganda dalam menganalisis telah memenuhi asumsi klasik yang dipersyaratkan.

Asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

a) Uji Normalitas

Asumsi model regresi linier klasik adalah faktor pengganggu μ mempunyai nilai rata-rata yang sama dengan nol, tidak berkorelasi dan mempunyai varian yang konstan. Dengan asumsi ini, OLS estimator atau penaksir akan memenuhi sifat-sifat yang diinginkan, seperti ketidakhacauan dan mempunyai varian yang minimum. Untuk mengetahui normal tidaknya faktor pengganggu μ dilakukan dengan Jarque-Bera Test (J-B Test). Uji ini menggunakan hasil estimasi residual dan X^2 probability distribution, yaitu dengan membandingkan nilai JB_{hitung} atau X^2_{hitung} dengan X^2_{tabel} . Kriteria keputusan sebagai berikut :

- 1) Jika nilai $JB_{hitung} > X^2_{tabel}$ (Prob < 0,05), maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual u_i berdistribusi normal ditolak.
- 2) Jika nilai $JB_{hitung} < X^2_{tabel}$ (Prob > 0,05), maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual u_i berdistribusi normal diterima

b) Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan linear diantara variabel-variabel dalam model regresi. Interpretasi dari persamaan regresi linier secara implisit bergantung bahwa variabel-variabel beda dalam persamaan tidak saling berkorelasi. Bila variabel-variabel bebas berkorelasi dengan sempurna, maka disebut multikolinieritas sempurna. Multikolinieritas dapat dideteksi dengan besaran-besaran regresi yang didapat yaitu :

- 1) Variasi besar (dari taksiran OLS)
- 2) Interval kepercayaan lebar (karena variasi besar, maka standar error besar sehingga interval kepercayaan lebar)
- 3) Uji-t tidak signifikan. Suatu variable bebas secara substansi maupun secara statistic jika dibuat regresi sederhana bias tidak signifikan karena variasi besar akibat kolinieritas. Bila standar error terlalu besar pula kemungkinan taksiran koefisien regresi tidak signifikan.
- 4) R^2 tinggi tetapi tidak banyak variable yang signifikan dari t-test.
- 5) Terkadang nilai taksiran koefisien yang didapat akan mempunyai nilai yang tidak sesuai dengan substansi sehingga dapat menyesatkan interpretasi.

c) Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dimaksudkan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antara residual (anggota) pada serangkaian observasi tertentu dalam suatu periode tertentu. Dalam model regresi linier berganda juga harus bebas dari *autokorelasi*. Ada berbagai metode yang digunakan untuk menguji ada tidaknya gejala *autokorelasi*. Dalam penelitian ini digunakan metode *Uji Durbin Watson*. Menurut *Durbin Watson*, besarnya koefisien *Durbin Watson* adalah antara 0-4. Kalau koefisien *Durbin Watson* sekitar 2, maka dapat dikatakan tidak ada korelasi, kalau besarnya mendekati 0, maka terdapat *autokorelasi* positif dan jika besarnya mendekati 4 (empat) maka terdapat autokorelasi negatif (Gujarati, 2000).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Melihat Prospek Stabilitas Perekonomian Di Indonesia

Perkembangan ekonomi negara Indonesia di mata dunia saat ini memang lebih baik jika dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin meningkatnya daya beli masyarakat akan beberapa barang tertentu, dan meningkatnya pendapatan masyarakat per kapita walaupun masih dalam skala kecil. Namun demikian dapat dilihat tidak semua hal mengalami peningkatan, masih ada beberapa hal yang memiliki hubungan dengan ekonomi Indonesia yang mengalami penurunan. Hal tersebut dinilai wajar, karena sebuah pertumbuhan ekonomi tidak hanya dapat dilihat dari 1 bidang saja, melainkan dapat dilihat dari berbagai macam bidang.

Jika dilihat dari perkembangan Ekonomi Indonesia pada tahun 1998, semua orang pasti tahu bahwa ekonomi Indonesia mengalami keterpurukan, akibat serangan ekonomi dari berbagai macam pihak. Namun hal itu yang kemudian membuat orang kembali berpikir untuk meningkatkan tarap ekonomi Indonesia agar lebih baik dan kembali meningkat seperti beberapa tahun sebelumnya.

Hal tersebut berhasil dilakukan tahap demi tahap, dengan memperbaiki dan membangun berbagai macam infrastruktur baru, membenahi berbagai macam aset Negara, peningkatan tenaga kerja yang berkualitas, ketersediaan bahan pangan, devisa negara, dll. Pemerintah juga tidak tinggal diam, dengan dikemasnya berbagai

macam hal untuk dapat memajukan perkembangan ekonomi Indonesia seperti membangun berbagai macam infrastruktur yang tentunya dapat menunjang perekonomian Indonesia seperti bandara, beberapa objek wisata yang mempunyai nilai jual tinggi, perbaikan taraf pendidikan masyarakat Indonesia, dan berbagai macam hal lainnya. <http://www.seputarukm.com/>

Perekonomian global masih menunjukkan perlambatan sebagaimana tercermin dari perkiraan merosotnya perekonomian negara-negara maju yang lebih besar dari perkiraan semula. Kondisi pasar keuangan global juga masih rapuh dengan banyaknya laporan kerugian lembaga keuangan dunia. Hal tersebut memberikan dampak negatif bagi perkembangan ekonomi di kawasan, terutama pada negara-negara yang yang mengandalkan ekspor ke negara maju, termasuk Indonesia.

Indonesia adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Indonesia mempunyai potensi ekonomi yang tinggi; potensi yang mulai diperhatikan dunia internasional dan memiliki sejumlah karakteristik yang menempatkan negara ini dalam posisi yang bagus untuk mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Kecuali, dalam beberapa tahun terakhir ada dukungan kuat dari pemerintah pusat untuk mengekang ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas (mentah), sekaligus meningkatkan peran industri manufaktur dalam perekonomian. Pembangunan infrastruktur juga merupakan tujuan utama pemerintah, yang menyebabkan efek multiplier dalam perekonomian.

Kondisi perekonomian global yang belum pulih dan adanya kemungkinan perluasan intensitas dan skala krisis membuat kita semua harus tetap waspada dan berhati-hati dalam menyikapi perkembangan yang ada. Konsisten menjaga kestabilan

dan kekuatan fundamental ekonomi melalui peningkatan iklim investasi dengan pembangunan infrastruktur dan pembenahan jalur birokrasi investasi, serta peningkatan kualitas belanja pemerintah menjadi beberapa agenda kebijakan pokok yang harus dijalankan untuk menjaga dan meningkatkan *trend* serta kualitas pertumbuhan ekonomi tahun 2013.

Dalam tahun 2012-2013, Bank Indonesia akan mengoptimalkan peran bauran kebijakan moneter untuk menjaga inflasi tetap berada di dalam kisaran sasarannya serta mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka mencegah risiko perlambatan ekonomi global. Sementara di bidang perbankan, Bank Indonesia akan meningkatkan efisiensi perbankan untuk mengoptimalkan kontribusinya dalam perekonomian dengan tetap memperkuat ketahanan perbankan.

Perekonomian RI masih mengalami guncangan dari adanya ketidakpastian ti tingkat global. Pelemahan kurs rupiah membayang-bayangi kondisi perekonomian di RI dan di khawatirkan membawa RI ke krisis seperti kondisi 1997. Tetapi apakah benar kondisi ekonomi RI sudah berada di lampu merah ?

Untuk menjawab pertanyaan itu, penting memahami indikator – indikator kunci makroekonomi di suatu Negara. Secara makro, terdapat tiga indicator kunci makroekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kesempatan kerja.

Indikator pertama ialah pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan nilai produk domestik bruto (PDB). Data dari BPS menunjukkan PDB atas dasar harga konstan mengalami pertumbuhan positif sepanjang 2014–2018 yaitu 4.88% (2014-2015), 5.03% (2015-2016), dan 5.07% (2016-2017). Berdasarkan laporan Bank Dunia (2018), di bawah ketidakpastian global pada kuartal 2 2018 perekonomian RI masih

mengalami pertumbuhan 5.3%, meningkat dari pertumbuhan di kuartal 1 2018 (5.1%).

Indikator kedua, inflasi yang mencerminkan kenaikan harga-harga secara umum. Indikator utama yang digunakan untuk mengukur inflasi ialah indeks harga konsumen (IHK) yang dikelompokkan menjadi tujuh kelompok pengeluaran yaitu, bahan makanan, makanan jadi, perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan olahraga serta transportasi, komunikasi dan jasa keuangan.

Pada 2015, 2016, dan 2017 IHK di RI masing- masing 3.35%, 3.02% dan 3.61%. Dengan inflasi yang dibawah dua digit itu (dibawah 10%) inflasi di RI masih masuk kategori wajar (inflasi ringan). Pada 2018, berdasarkan laporan BPS, inflasi di RI masih masuk kategori aman yaitu 3.21% (Januari-September 2018).

Indikator kunci ketiga adalah kesempatan kerja dengan indikator itu terkait erat dengan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja semakin tersedia. Berdasarkan laporan World Bank (2018), employment rate di RI pada februari 2018 mencapai 65.7%, meningkat jika dibandingkan Februari 2017 (65.3%). Pada periode yang sama, tingkat pengangguran turun dari 5.3% menjadi 5.1%.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menyampaikan bahwa prospek ekonomi Indonesia akan semakin membaik dengan pertumbuhan yang lebih tinggi dan stabilitas yang tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 diperkirakan konsisten meningkat hingga mencapai kisaran 5,0-5,4%. Inflasi 2019 tetap terkendali pada kisaran sasaran 3,5+1% dengan terjaganya tekanan harga dari sisi permintaan, *volatile foods* dan *administered prices*, ekspektasi inflasi, dan stabilnya nilai tukar

Rupiah. Defisit transaksi berjalan 2019 akan turun menjadi sekitar 2,5% dari PDB dengan langkah-langkah pengendalian impor serta peningkatan ekspor dan pariwisata. Fungsi intermediasi perbankan dan pembiayaan ekonomi dari pasar modal akan terus meningkat. Pertumbuhan kredit di 2019 diperkirakan mencapai 10-12%, sementara pertumbuhan DPK perbankan mencapai 8-10% dengan kecukupan likuiditas yang terjaga. Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi 2024 diproyeksikan akan lebih tinggi lagi yaitu mencapai kisaran 5,5-6,1%, dan defisit transaksi berjalan akan menurun dibawah 2% dari PDB.

Berlandaskan data tersebut, benar bahwa ekonomi RI mengalami guncangan . Namun belum sampai level lampu merah mengingat tiga indikator kunci (PDB, inflasi, dan kesempatan kerja) masih berada pada level yang tidak membahayakan.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi memang dipastikan terjadi akibat guncangann eksternal itu. Berdasarkan hasil forecasting World Bank (2018), pada 2018 dan 2019 pertumbuhan ekonomi RI akan berada dilevel 5.2%, IHK di 2018 sekitar 3.4% dan meningkat menjadi 3.7% di 2019. Disamping itu, kondisi ekonomi yang mengalami guncangan saat ini dapat dijadikan momentum untuk kembali menggiatkan upaya pemangkasan biaya produksi. Terutama biaya yang selama ini banyak dikeluhkan pengusaha. Saber pungli harus kembali diaktifkan pemerintah agar produksi dan distribusi baranf di RI dapat dilakukan produsen secara efesien.

2. Perkembangan Variabel Penelitian

Bagian ini menguraikan perkembangan variabel-variabel penelitian yaitu Inflasi, PDB, Suku Bunga, Jumlah Uang Beredar, Kurs (Nilai Tukat), Tax (pajak), Government (pengeluaran pemerintah) dan Investasi selama periode penelitian yaitu tahun 2001 sampai dengan tahun 2017.

a. Fluktuasi Inflation

Inflasi, yaitu proses terjadinya kenaikan harga – harga yang terjadi dalam suatu perekonomian. Data inflasi diperoleh mulai tahun 2001 sampai dengan tahun 2017.

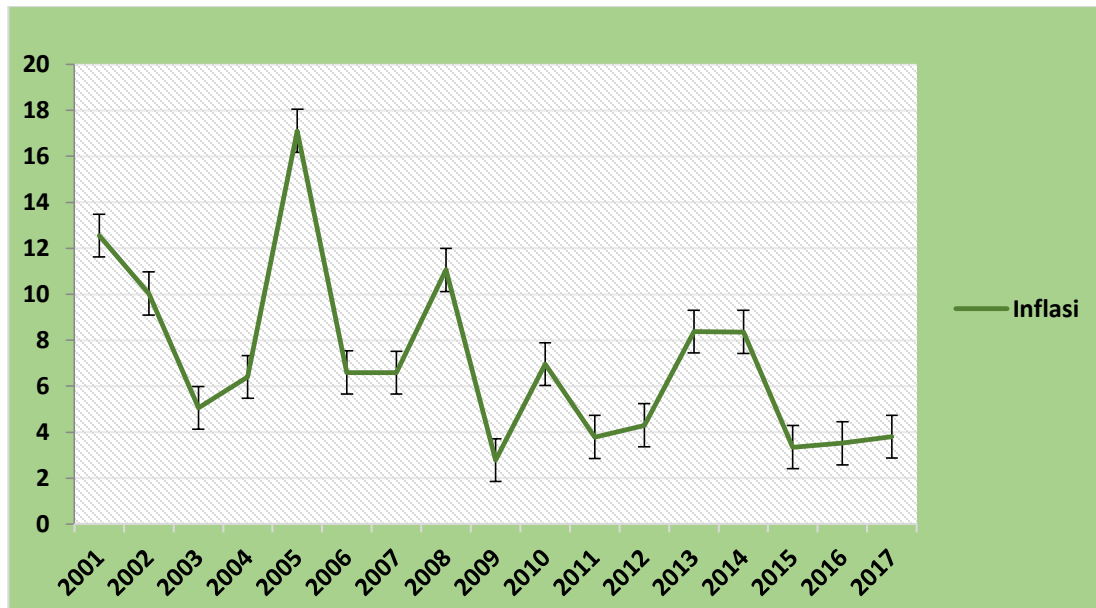
Berikut perkembangan data inflasi.

Tabel 4.1 Data Perkembangan Inflasi Di Indonesia Pada Tahun 2001 s/d 2017

No	Tahun	Inflasi (%)
1	2001	12.55
2	2002	10.03
3	2003	5.06
4	2004	6.40
5	2005	17.11
6	2006	6.60
7	2007	6.59
8	2008	11.06
9	2009	2.78
10	2010	6.96
11	2011	3.79
12	2012	4.30
13	2013	8.38
14	2014	8.36
15	2015	3.35
16	2016	3.52
17	2017	3.80

Sumber : Wordbank

Grafik 4.1 :Perkembangan Inflasi Di Indonesia Pada Tahun 2001 s/d 2017



Gambar 4.1 : Perkembangan Inflasi di Indonesia Tahun 2001-2017

Sumber : Tabel4.1

Berdasarkan tabel 4.1 dan grafik 4.1 di atas diketahui inflasi di Indonesia mengalami fluktuasi yang beragam dari tahun 2001 sampai 2017. Di mana inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2005 sebesar 17.11% , inflasi terendah terjadi pada tahun 2009 sebesar 2.78%. Terjadi peningkatan kembali inflasi di Indonesia pada tahun 2013, 2014 dengan nilai 8.36%, 8.38% mengalami peningkatan cukup tinggi dari tahun sebelumnya.

b. Progress Produk Domestic Bruto

Ekonomi bertumbuh adalah titik keseimbangan ekonomi suatu negara antara permintaan agregat dan penawaran agregat semakin baik dari sebelumnya.

PDB mendapatkan hasil baik, yaitu: 1). Barang akhir dan nilai tambah, yaitu penghitungan ganda di hindari dengan menggunakan nilai tambah (*value added*), selisih antara nilai barang ketika meninggalkan tahap produksi dan biaya barang

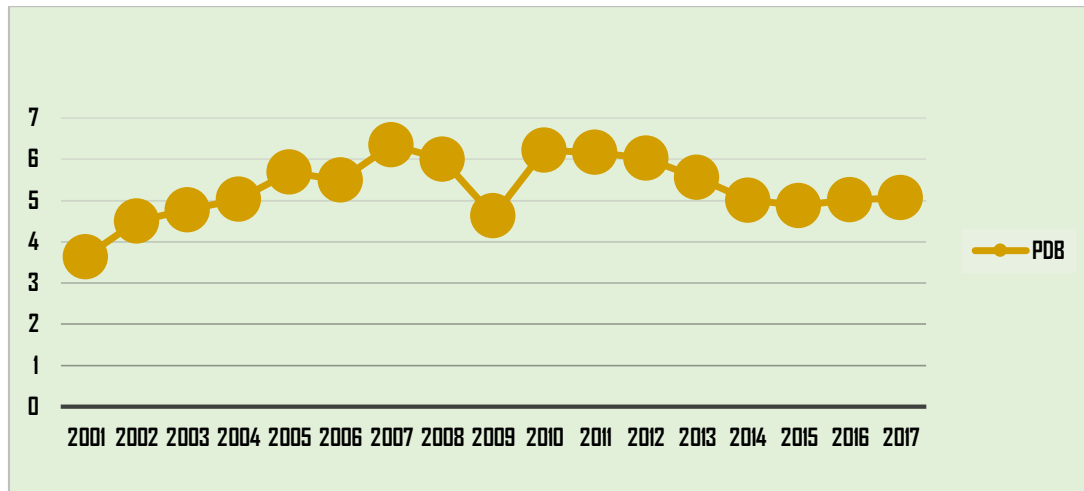
ketika memasuki tahap itu. 2). Output sekarang yakni PDB merupakan nilai outputsekarang diproduksi, mengeluarkan transaksi komoditi, seperti pemilik lama atau perumahan yang sudah ada. 3). Mengukur kesejahteraan penduduk suatu negara. PDB merupakan pendapatan yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Berikut perkembangan PDB Indonesia Tahun 2001 Sampai dengan Tahun 2017.

Tabel 4.2 Data Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2001 s/d 2017

No	Tahun	Pertumbuhan (%)
1	2001	3.64
2	2002	4.50
3	2003	4.78
4	2004	5.03
5	2005	5.69
6	2006	5.50
7	2007	6.35
8	2008	6.01
9	2009	4.63
10	2010	6.22
11	2011	6.17
12	2012	6.03
13	2013	5.56
14	2014	5.01
15	2015	4.88
16	2016	5.02
17	2017	5.07

Sumber : Wordbank

Grafik 4.2 : Perkembangan PDB Di Indonesia Pada Tahun 2001 s/d 2017



Gambar 4.2 : Perkembangan PDB di Indonesia Tahun 2001 – 2017

Sumber : Tabel 4.2

Perkembangan pertumbuhan PDB pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2008 terus mengalami peningkatan sampai pada tahun 2008. Tetapi pada tahun 2009 perkembangan PDB cenderung mengalami penurunan. Turunnya PDB disebabkan adanya pengaruh dalam krisis ekonomi global yang sedang melanda Amerika Serikat, krisis ekonomi Amerika ini semakin lama semakin merambat hingga menjadi krisis ekonomi global. Oleh karena itu negara Indonesia juga ikut merasakan dampak dari krisis ekonomi global ini. Indonesia juga merupakan negara yang saat ini masih bergantung dengan aliran dana dari investor asing, dengan terjadinya krisis global ini secara otomatis para investor asing akan menarik dananya dari Indonesia. Krisis ekonomi global ini menyebabkan berbagai penurunan indikator ekonomi seperti ekspor dan impor yang akan mempengaruhi suatu permintaan akan barang sehingga pada berbagai produksi barang juga akan menurun. Pertumbuhan ekonomi daerah yang cukup tinggi terutama didorong oleh kegiatan konsumsi dan ekspor, sedangkan

untuk pertumbuhan investasi di daerah, walaupun terdapat indikasi membaik namun belum mampu memberikan dukungan kuat terhadap pertumbuhan ekonomi.

c. Fluktuasi Interest Rate

Tingkat suku bunga adalah harga dari penggunaan dana investasi(*loanable funds*).

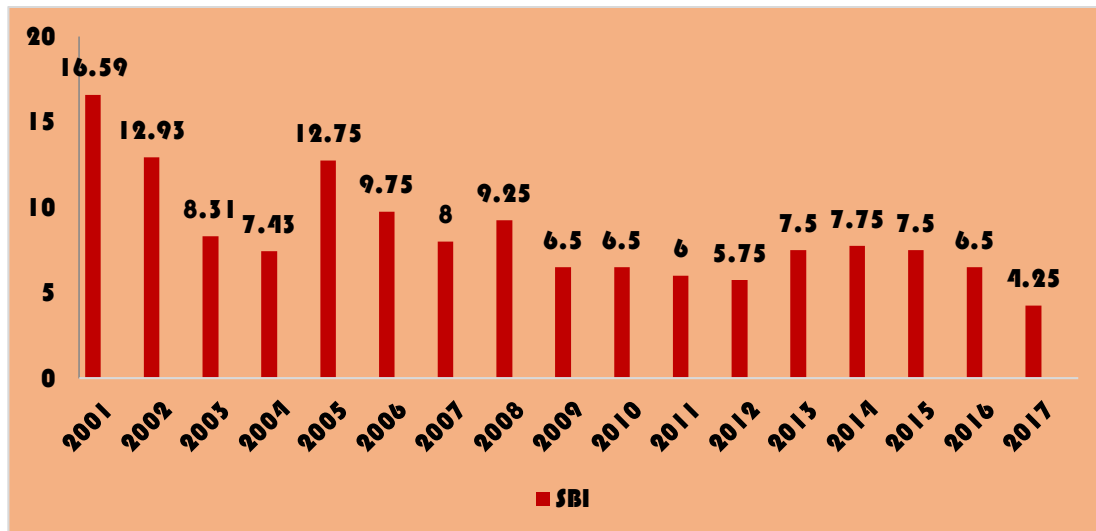
Data mulai Tahun 2001 Sampai Tahun 2017 dapat dilihat pada gambar berikut.

Tabel 4.3 Data Tingkat Suku Bunga Di Indonesia Tahun 2001 s/d 2017

No	Tahun	Bunga (%)
1	2001	16.59
2	2002	12.93
3	2003	8.31
4	2004	7.43
5	2005	12.75
6	2006	9.75
7	2007	8.00
8	2008	9.25
9	2009	6.50
10	2010	6.50
11	2011	6.00
12	2012	5.75
13	2013	7.50
14	2014	7.75
15	2015	7.50
16	2016	6.50
17	2017	4.25

Sumber : www.bps.go.id

Grafik 4.3 :Perkembangan Tingkat Suku Bunga Di Indonesia Pada Tahun 2001 s/d 2017



Gambar 4.3 : Perkembangan Tingkat Suku Bunga di Indonesi Tahun 2001-2017
Sumber : Tabel 4.3

Berdasarkan gambar 4.3 di atas diketahui bahwa nilai SBI pada tahun 2017 merupakan titik terendah berada pada kisaran dibawah 6% sedangkan pada tahun 2001 nilai tingkat suku bunga mencapai level tertinggi mencapai di atas 16%, kemudian pada nilai tingkat suku bunga mengalami penurunan sampai pada tahun 2004 dan kembali meningkat di awal tahun 2005. Pemerintah mengendalikan tingkat suku bunga melalui pengendalian jumlah uang beredar yang bertujuan untuk menumbuhkan sektor riil melalui pinjaman investasi dengan bunga yang rendah.

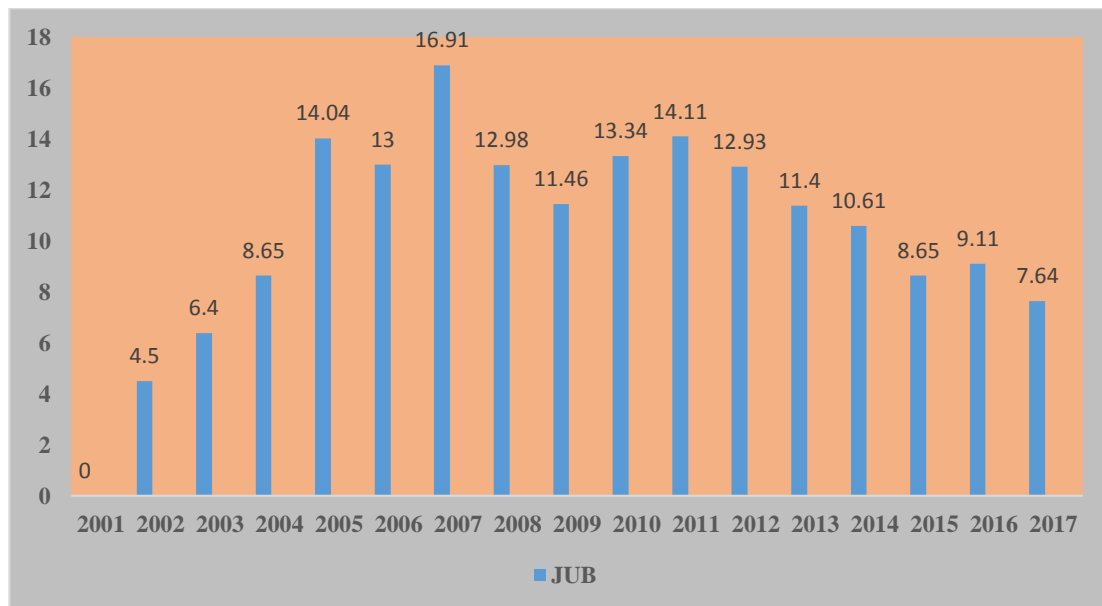
d. Fluktuasi Money Supply

Jumlah uang beredar adalah daya beli yang langsung bisa digunakan untuk pembayaran, bisa diperluas dan mencakup alat-alat pembayaran yang “mendekati” uang, misalnya deposito berjangka (time deposits) dan simpanan tabungan (saving deposits) pada bank-bank. Data mulai Tahun 2001 Sampai Tahun 2017 dapat dilihat pada gambar berikut.

Tabel 4.4 Jumlah Uang Beredar Di Indonesia Tahun 2001 s/d 2017

No	Tahun	JUB (%)
1	2001	-
2	2002	4.50
3	2003	6.40
4	2004	8.65
5	2005	14.04
6	2006	13.00
7	2007	16.91
8	2008	12.98
9	2009	11.46
10	2010	13.34
11	2011	14.11
12	2012	12.93
13	2013	11.40
14	2014	10.61
15	2015	8.65
16	2016	9.11
17	2017	7.64

Sumber : www.bps.go.id

Grafik 4.4 : Perkembangan Jumlah Uang Beredar Di Indonesia Pada Tahun 2001 s/d 2017

Gambar 4.4 : Perkembangan Jumlah Uang Beredar di Indonesia Tahun 20001-2017

Sumber : Tabel 4.4

Berdasarkan gambar 4.4 di atas diketahui bahwa nilai JUB pada tahun 2007 merupakan nilai tertinggi dengan kisaran sebesar 19%. Kemudian pada tahun 2009 jumlah uang beredar menurun dengan nilai sebesar 12.95% . Lalu pada tahun tahun selanjutnya jumlah uang beredar masih mengalami fluktuasi mengingat bahwa perputaran uang dimasyarakat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga.

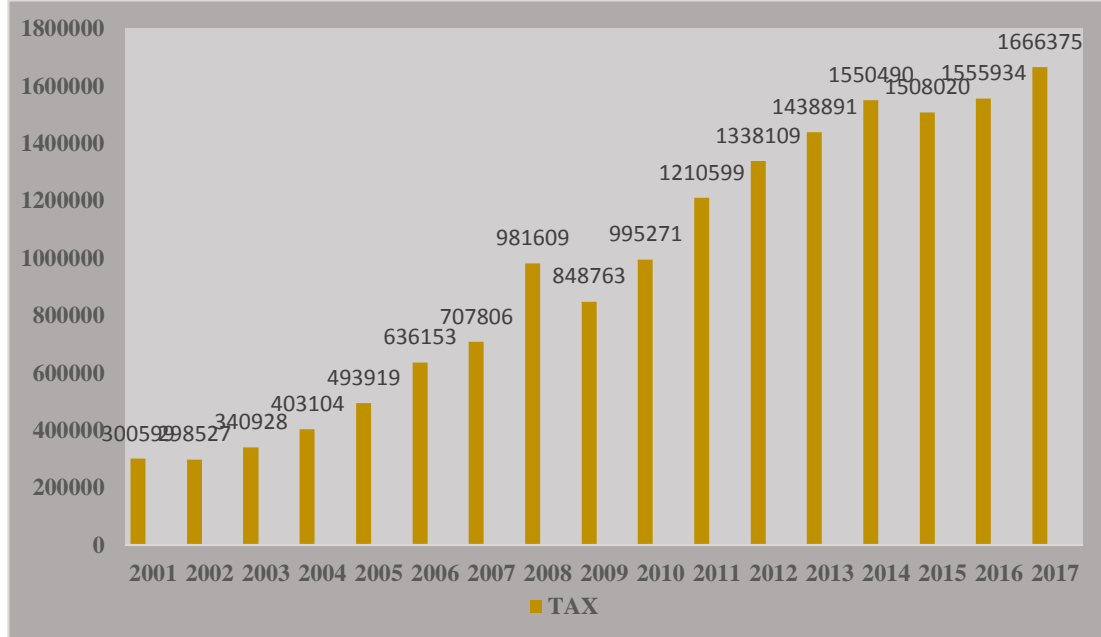
e. Progress Tax

Pajak adalah iuran rakyat kas Negara berdasarkan Undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Data mulai Tahun 2001 Sampai Tahun 2017 dapat dilihat pada gambar berikut.

Tabel 4.5 Pajak Di Indonesia Tahun 2001 s/d 2017

No	Tahun	TAX (Milyar Rp)
1	2001	300599
2	2002	298527
3	2003	340928
4	2004	403104
5	2005	493919
6	2006	636153
7	2007	707806
8	2008	981609
9	2009	848763
10	2010	995271
11	2011	1210599
12	2012	1338109
13	2013	1438891
14	2014	1550490
15	2015	1508020
16	2016	1555934
17	2017	1666375

Sumber : Wordbank

Grafik 4.5 : Perkembangan Pajak Di Indonesia Pada Tahun 2001 s/d 2017

Gambar 4.5 : Perkembangan Pajak di Indonesia pada tahun 2001 – 2017

Sumber : Tabel 4.5

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat pajak selama periode 2001 sampai 2017 yang mengalami fluktuasi yang beragam. Pada tahun 2001 sampai 2008 pajak mengalami peningkatan. Di tahun 2010 pajak menurun mencapai nilai sebesar 848763. Penyebabnya karena terjadinya krisis ekonomi dunia yang sangat berdampak terhadap Indonesia dan juga kurangnya kedisiplinan dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dengan tepat waktu. Hal ini dinyatakan dalam suatu pandangan dari Peacock dan Wiseman “Usaha pemerintah untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakatnya tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar pula”.

f. Progress Government

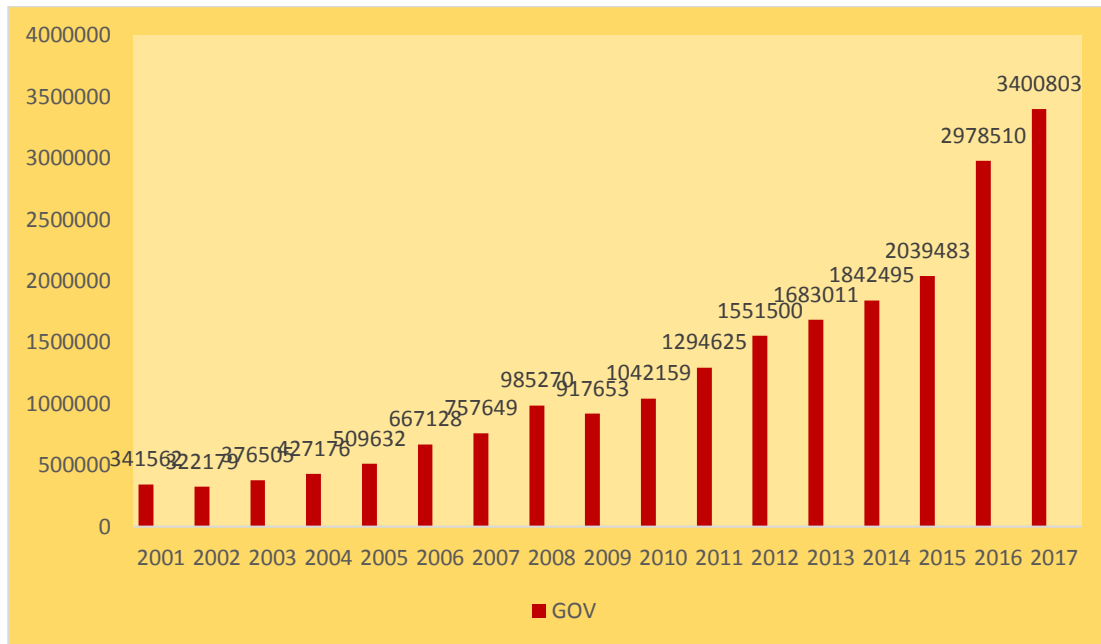
Pengeluaran pemerintah yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Data mulai Tahun 2001 Sampai Tahun 2017 dapat dilihat pada gambar berikut.

Tabel 4.6 Pengeluaran Pemerintah Di Indonesia Tahun 2001 s/d 2017

No	Tahun	GOV (Milyar Rp)
1	2001	341562
2	2002	322179
3	2003	376505
4	2004	427176
5	2005	509632
6	2006	667128
7	2007	757649
8	2008	985270
9	2009	917653
10	2010	1042159
11	2011	1294625
12	2012	1551500
13	2013	1683011
14	2014	1842495
15	2015	2039483
16	2016	2978510
17	2017	3400803

Sumber : Wordbank

Grafik 4.6 : Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Di Indonesia Pada Tahun 2001 s/d 2017



Gambar 4.6 : Perkembangan Pengeluaran Pemerintah di Indonesia Tahun 2001 – 2017
Sumber : Tabel 4.6

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat pengeluaran pemerintah selama periode 2001 sampai 2008 yang mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2009 pengeluaran pemerintah meningkat sebesar 917653. Lalu pada tahun 2010 pengeluaran pemerintah meningkat kembali dengan nilai 1042159. Pelambatan laju pengeluaran pemerintah ini dikarenakan daya serap belanja pemerintah yang rendah. Sebagian dari konsumsi pemerintah digunakan untuk membayar bunga utang yang tidak masuk dalam perhitungan PDB.

g. Fluktuasi Kurs

Nilai tukar adalah sebuah perjanjian yang dikenal sebagai nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat kini atau dikemudian hari, antara dua mata uang masing – masing negara atau wilayah. Data mulai Tahun 2001 Sampai Tahun 2017 dapat dilihat pada gambar berikut.

Tabel 4.7 Kurs Di Indonesia Tahun 2001 s/d 2017

No	Tahun	Kurs (US\$)
1	2001	10400
2	2002	8940
3	2003	8465
4	2004	9290
5	2005	9830
6	2006	9020
7	2007	9419
8	2008	10950
9	2009	9400
10	2010	8991
11	2011	9068
12	2012	9670
13	2013	12189
14	2014	12440
15	2015	13795
16	2016	13463
17	2017	13548

Sumber : www.bps.go.id

Grafik 4.7 : Perkembangan Kurs Di Indonesia Pada Tahun 2001 s/d 2017

Gambar 4.7 : Perkembangan Kurs di Indonesia Tahun 2001 – 2017

Sumber : Tabel 4.7

Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat diketahui bahwa nilai tukar rupiah terhadap dollar mengalami depresiasi yaitu pada tahun 2001 yang berkisar pada 10400 rupiah/USD. Begitu juga pada tahun selanjutnya yaitu pada tahun 2008 rupiah mengalami penurunan hingga berkisar pada 10950 rupiah/USD. Tetapi pada tahun selanjutnya rupiah mengalami peningkatan sedikit demi sedikit. Tetapi pada tahun 2013-2015 rupiah kembali mengalami penurunan hingga berkisar pada 12189-13795 rupiah/USD. Terdepresiasinya nilai tukar rupiah dikarenakan adanya kenaikan jumlah uang beredar, turunnya suku bunga dan permintaan masyarakat terhadap barang.

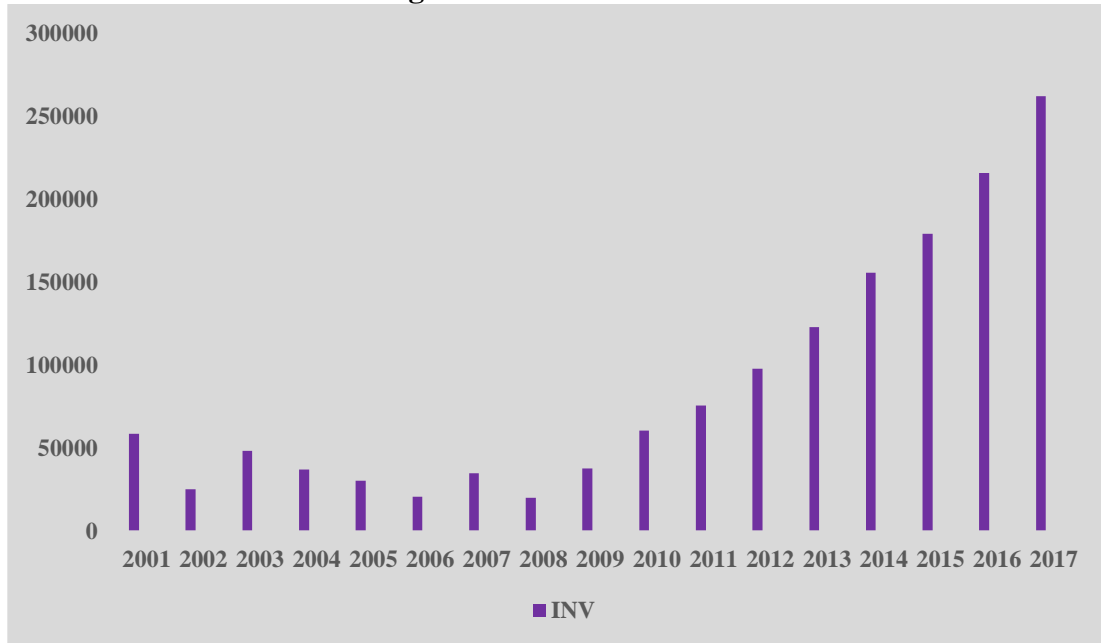
h. Progress Investment

Investasi adalah suatu aktifitas menempatkan dana pada satu periode tertentu dengan harapan penggunaan dana tersebut bias menghasilkan keuntungan dan/atau peningkatan nilai investasi. Data mulai Tahun 2001 Sampai Tahun 2017 dapat dilihat pada gambar berikut.

Tabel 4.8 Investasi Di Indonesia Tahun 2001 s/d 2017

No	Tahun	Investasi (Milyar Rp)
1	2001	58816.02
2	2002	25307.6
3	2003	48484.8
4	2004	37140.4
5	2005	30665.0
6	2006	20788.4
7	2007	34878.7
8	2008	20363.4
9	2009	37799.9
10	2010	60626.3
11	2011	76000.7
12	2012	98182.0
13	2013	123150.6
14	2014	156126.3
15	2015	179456.9
16	2016	216230.8
17	2017	262351

Sumber : www.bps.go.id

Grafik 4.8 : Perkembangan Kurs Di Indonesia Pada Tahun 2001 s/d 2017

Gambar 4.8 : Perkembangan Investasi di Indonesia Tahun 2001 – 2017

Sumber : Tabel 4.8

Dari Tabel dan grafik diatas menunjukkan data pertumbuhan investasi yang berfluktuatif dari tahun 2001 sampai 2017. Pertumbuhan investasi pada tahun 2006 mengalami penurunan sampai 20788.4 dikarenakan laju inflasi yang tinggi, laju inflasi yang tinggi disebabkan kenaikan harga BBM (pernyataan ini diperkuat oleh penelitian terdahulu yaitu penelitian Hervita:2015). Dan pada tahun 2008 pertumbuhan investasi mengalami penurunan kembali yaitu sebesar 20363.4 hal ini disebabkan oleh krisis global yang melanda dunia. Dan pada tahun-tahun selanjutnya investasi telah mengalami perbaikan yang cukup signifikan.

3. Hasil Uji Metode Simultan

a. Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas Data

Uji normalitas data merupakan salah satu asumsi yang diperlukan dalam regresi linier berganda. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah residual dari data berdistribusi normal atau tidak. Berikut hasil pengolahan Eviews:

Tabel 4.9 Uji Normalitas Data

System Residual Normality Tests				
Orthogonalization: Cholesky (Lutkepohl)				
Null Hypothesis: residuals are multivariate normal				
Date: 11/16/19 Time: 17:43				
Sample: 2001 2017				
Included observations: 17				
Component	Skewness	Chi-sq	df	Prob.
1	-0.508532	0.732715	1	0.3920
2	0.709238	1.425220	1	0.2325
Joint		2.157935	2	0.3399
Component	Kurtosis	Chi-sq	df	Prob.
1	2.607808	0.108952	1	0.7413
2	2.340844	0.307761	1	0.5791
Joint		0.416713	2	0.8119
Component	Jarque-Bera	Df	Prob.	
1	0.841667	2	0.6565	
2	1.732981	2	0.4204	
Joint		2.574648	4	0.6313

Pada penelitian ini, untuk menguji normalitas data digunakan *uji Jarque-Bera*. Kriteria yang digunakan adalah jika nilai probabilitas *Jarque-Bera* (JB) test > alpha

0.05, maka data dikatakan normal. Pada tabel diketahui bahwa nilai probabilitas sebesar $0.6313 > 0.05$ sehingga asumsi normalitas telah terpenuhi.

b) Uji Autokorelasi

Untuk mendeteksi ada tidaknya korelasi serial dalam model penelitian ini dilakukan uji *Residual Tests for Autocorrelations*. Asumsi tidak terjadi efek autokorelasi apabila nilai prob $> 0,05$.

Tabel 4.10 Uji *Residual Tests for Autocorrelations*

System Residual Portmanteau Tests for Autocorrelations					
Null Hypothesis: no residual autocorrelations up to lag h					
Date: 11/16/19 Time: 17:44					
Sample: 2001 2017					
Included observations: 17					
Lags	Q-Stat	Prob.	Adj Q-Stat	Prob.	df
1	3.134681	0.5355	3.330599	0.5041	4
2	6.213581	0.6233	6.820018	0.5562	8
3	10.39745	0.5811	11.90043	0.4537	12
4	15.48110	0.4897	18.54829	0.2928	16
5	18.37136	0.5630	22.64281	0.3067	20
6	19.53457	0.7229	24.44051	0.4367	24
7	20.84100	0.8319	26.66144	0.5367	28
8	26.10937	0.7587	36.61281	0.2632	32
9	27.39558	0.8480	39.34598	0.3225	36
10	29.26242	0.8948	43.87976	0.3105	40
11	30.32310	0.9419	46.88501	0.3550	44
12	31.69101	0.9665	51.53591	0.3372	48

*The test is valid only for lags larger than the System lag order.

df is degrees of freedom for (approximate) chi-square distribution

Berdasarkan hasil df is degrees of freedom for (approximate) chi-square distribution diatas dapat diketahui bahwa seluruh indikator pergerakan lags dari waktu ke waktu tidak menunjukkan adanya efek autokorelasi dalam pergerakan data, dimana nilai Q-stat dan Adj Q-stat seluruhnya melebihi 0,05 sehingga terbukti bahwa tidak ada didalam data memiliki efek autokorelasi.

b. Regresi Simultan

Estimasi untuk mengetahui pengaruh variabel secara 2 persamaan simultan dilakukan dengan menggunakan model *Two-Stage Least Squares*. Hasil estimasi sistem persamaan dengan *Two-Stage Least Squares* ditunjukkan pada tabel dibawah ini. Dari tabel diketahui 2 (dua) persamaan model simultannya :

a. Persamaan 1

Tabel 4.11 Hasil Estimasi Persamaan *Two-Stage Least Squares*

System: YCM				
Estimation Method: Two-Stage Least Squares				
Date: 11/16/19 Time: 17:42				
Sample: 2001 2017				
Included observations: 17				
Total system (balanced) observations 34				
	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C(10)	6.811507	27.14231	0.250955	0.8041
C(11)	0.999861	0.792650	1.261416	0.2198
C(12)	0.530847	1.152951	0.460425	0.6495
C(13)	0.621659	1.526842	0.407153	0.6877
C(14)	-0.145180	0.242161	-0.599518	0.5547
C(15)	-1.296817	3.285467	-0.394713	0.6967
C(20)	9.988995	0.233096	42.85358	0.0000
C(21)	-0.045904	0.059253	-0.774722	0.4464
C(22)	0.379110	0.059938	6.324988	0.0000
C(23)	0.010694	0.017989	0.594492	0.5580
C(24)	-0.057881	0.021326	-2.714077	0.0124
Determinant residual covariance		3.13E-05		
Equation: LOG(INF)=C(10)+C(11)*LOG(SBI)+C(12)*LOG(JUB)+C(13)*LOG(KURS)+C(14)*LOG(INV)+ C(15)*LOG(PDB)				
Instruments: SBI JUB KURS TAX GOV INV C				
Observations: 17				
R-squared	0.624356	Mean dependent var		1.831407
Adjusted R-squared	0.453608	S.D. dependent var		0.518128
S.E. of regression	0.382991	Sum squared resid		1.613506
Durbin-Watson stat	2.529751			
Equation: LOG(PDB)=C(20)+C(21)*LOG(TAX)+C(22)*LOG(GOV)+C(23)*LOG(INV)+C(24)*LOG(INF)				
Instruments: SBI JUB KURS TAX GOV INV C				
Observations: 17				
R-squared	0.992213	Mean dependent var		14.60067
Adjusted R-squared	0.989617	S.D. dependent var		0.279579
S.E. of regression	0.028488	Sum squared resid		0.009739
Durbin-Watson stat	2.703930			

Berdasarkan hasil output persamaan struktural dapat diketahui adanya 2 persamaan, berikut masing-masing penjelasan dalam 2 persamaan :

- **Regresi**

Persamaan pertama adalah persamaan yang digunakan untuk mengetahui secara simultan terhadap inflasi dengan persamaan sebagai berikut sebagai berikut:

$$\text{LOG(INF)} = \text{C(10)} + \text{C(11)} * \text{LOG(SBI)} + \text{C(12)} * \text{LOG(JUB)} + \text{C(13)} * \text{LOG(KURS)} + \text{C(14)} * \text{LOG(INV)} + \text{C(15)} * \text{LOG(PDB)} + \varepsilon_1$$

Berdasarkan persamaan tersebut hasil output eviews dengan model *Two-Stage Least Square*, sebagai berikut :

$$\text{LOG(INF)} = 6.811 + 0.999 * \text{LOG(SBI)} + 0.530 * \text{LOG(JUB)} + 0.621 * \text{LOG(KURS)} - 0.145 * \text{LOG(INV)} - 1.296 * \text{LOG(PDB)} + \varepsilon_1$$

a. Koefisien dalam elastisitas SBI terhadap INF

Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa koefisien regresi untuk suku bunga (SBI) positif 0.999 mengandung arti bahwa peningkatan terhadap suku bunga sebesar 1 persen maka inflasi (INF) akan meningkat sebesar 0.999 persen. Nilai koefisien sebesar 0.999 dapat dihitung elastisitas SBI dengan formula sebagai berikut :

$$E \text{ SBI} = \frac{dINF}{dSBI} \times \frac{SBI}{INF} = 0.999 \times \frac{8.427059}{7,096471}$$

$$= 0.999 \times 1.187$$

$$= 1.185 > 1 = \text{Elastis}$$

Berdasarkan hasil koefisien regresi diketahui nilai **positif** dan **elastis**, yang mengandung arti bahwa setiap peningkatan suku bunga maka akan menghasilkan persentase penambahan terhadap inflasi yang lebih besar.

b. Koefisien dalam elastisitas JUB terhadap INF

Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa koefisien regresi untuk jumlah uang beredar (JUB) positif 0.530 mengandung arti bahwa peningkatan terhadap jumlah uang beredar sebesar 1 persen maka inflasi (INF) akan mengalami peningkatan sebesar 0.530 persen. Nilai koefisien sebesar 0.530 dapat dihitung elastisitas JUB dengan formula sebagai berikut :

$$\begin{aligned} E_{JUB} &= \frac{dINF}{dJUB} \times \frac{JUB}{INF} = 0.530 \times \frac{2559287,018}{7,096471} \\ &= 0.530 \times 360.6 \\ &= 191.118 > 1 = \text{Elastis} \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil koefisien regresi diketahui nilai **positif** dan **elastis**, yang mengandung arti bahwa setiap peningkatan jumlah uang beredar maka akan menghasilkan persentase peningkatan terhadap inflasi yang lebih besar.

c. Koefisien dalam elastisitas KURS terhadap INF

Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa koefisien regresi nilai tukar (KURS) positif 0.621 mengandung arti bahwa peningkatan terhadap nilai tukar sebesar 1 persen maka inflasi (INF) akan meningkat sebesar 0.621 persen. Nilai koefisien sebesar 0.621 dapat dihitung elastisitas KURS dengan formula sebagai berikut :

$$E \text{ KURS} = \frac{dINF}{dKURS} \times \frac{KURS}{INF} = 0.621 \times \frac{10522.23}{7.096471}$$

$$= 0.621 \times 1482.7$$

$$= 920.75 > 1 = \text{Elastis}$$

Berdasarkan hasil koefisien regresi diketahui nilai **positif** dan **elastis**, yang mengandung arti bahwa setiap peningkatan nilai tukar maka akan menghasilkan persentase penambahan terhadap inflasi yang lebih besar.

d. Koefisien dalam elastisitas INV terhadap INF

Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa koefisien regresi untuk investasi (INV) negatif 0.145 mengandung arti bahwa peningkatan terhadap investasi sebesar 1 persen maka inflasi (INF) akan menurun sebesar 0.145 persen. Nilai koefisien sebesar 0.145 dapat dihitung elastisitas INV dengan formula sebagai berikut :

$$E \text{ INV} = \frac{dINF}{dINV} \times \frac{INV}{INF} = 0.145 \times \frac{87433.46}{7,096471}$$

$$= 0.145 \times 12320.6$$

$$= 1786 > 1 = \text{Elastis}$$

Berdasarkan hasil koefisien regresi diketahui nilai **negatif** dan **elastis**, yang mengandung arti bahwa setiap peningkatan nilai tukar maka akan menghasilkan persentase penurunan terhadap inflasi yang lebih besar.

e. Koefisien dalam elastisitas PDB terhadap INF

Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa koefisien regresi untuk pertumbuhan ekonomi (PDB) negatif 1.296 mengandung arti bahwa peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen maka inflasi (INF) akan menurun sebesar 1.296 persen. Nilai koefisien sebesar 1.296 dapat dihitung elastisitas PDB dengan formula sebagai berikut :

$$\begin{aligned} E \text{ PDB} &= \frac{dINF}{dPDB} \times \frac{PDB}{INF} = 1.296 \times \frac{2275506}{7,096471} \\ &= 1.296 \times 320653 \\ &= 415566 > 1 = \text{Elastis} \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil koefisien regresi diketahui nilai **negatif** dan **elastis**, yang mengandung arti bahwa setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi maka akan menghasilkan persentase penurunan terhadap inflasi yang lebih besar.

▪ **Uji t**

Prob SBI = 0.21 > 0.05 = tidak signifikan

Prob JUB = 0.64 > 0.05 = tidak signifikan

Prob KURS = 0.68 > 0.05 = tidak signifikan

Prob INV = 0.55 > 0.05 = tidak signifikan

Prob PDB = 0.69 > 0.05 = tidak signifikan

Berdasarkan hasil estimasi diketahui bahwa tidak ada variabel yg signifikan terhadap INF. Maka H_0 ditolak.

Artinya : SBI, JUB, KURS, INV, dan PDB tidak berpengaruh signifikan terhadap INF.

- **Uji d**

Berdasarkan hasil estimasi di atas dapat menunjukkan bahwa $R^2 = 0.6243$ yang bermakna bahwa variable suku bunga (SBI), jumlah uang beredar (JUB) , nilai tukar (KURS) , investasi (INV) dan pertumbuhan ekonomi (PDB) mampu menjelaskan variasi inflasi (INF) sebesar 62.43% dan sisanya sebesar 37.57% dijelaskan oleh variable lain yang tidak dimasukkan dalam modal estimasi.

b. Persamaan 2

Tabel 4.12 Hasil Estimasi Persamaan *Two-Stage Least Squares*

System: YCM				
Estimation Method: Two-Stage Least Squares				
Date: 11/16/19 Time: 17:42				
Sample: 2001 2017				
Included observations: 17				
Total system (balanced) observations 34				
	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C(10)	6.811507	27.14231	0.250955	0.8041
C(11)	0.999861	0.792650	1.261416	0.2198
C(12)	0.530847	1.152951	0.460425	0.6495
C(13)	0.621659	1.526842	0.407153	0.6877
C(14)	-0.145180	0.242161	-0.599518	0.5547
C(15)	-1.296817	3.285467	-0.394713	0.6967
C(20)	9.988995	0.233096	42.85358	0.0000
C(21)	-0.045904	0.059253	-0.774722	0.4464
C(22)	0.379110	0.059938	6.324988	0.0000
C(23)	0.010694	0.017989	0.594492	0.5580
C(24)	-0.057881	0.021326	-2.714077	0.0124
Determinant residual covariance		3.13E-05		
Equation: LOG(INF)=C(10)+C(11)*LOG(SBI)+C(12)*LOG(JUB)+C(13)*LOG(KURS)+C(14)*LOG(INV)+ C(15)*LOG(PDB)				
Instruments: SBI JUB KURS TAX GOV INV C				
Observations: 17				
R-squared	0.624356	Mean dependent var	1.831407	
Adjusted R-squared	0.453608	S.D. dependent var	0.518128	
S.E. of regression	0.382991	Sum squared resid	1.613506	
Durbin-Watson stat	2.529751			
Equation: LOG(PDB)=C(20)+C(21)*LOG(TAX)+C(22)*LOG(GOV)+C(23)*LOG(INV)+C(24)*LOG(INF)				
Instruments: SBI JUB KURS TAX GOV INV C				
Observations: 17				
R-squared	0.992213	Mean dependent var	14.60067	
Adjusted R-squared	0.989617	S.D. dependent var	0.279579	
S.E. of regression	0.028488	Sum squared resid	0.009739	
Durbin-Watson stat	2.703930			

Berdasarkan hasil output persamaan struktural dapat diketahui adanya 2

persamaan, berikut masing-masing penjelasan dalam 2 persamaan :

- **Regresi**

Persamaan kedua adalah persamaan yang digunakan untuk mengetahui secara simultan terhadap PDB dengan persamaan sebagai berikut sebagai berikut:

$$\text{LOG(PDB)} = C(20) + C(21) * \text{LOG(TAX)} + C(22) * \text{LOG(GOV)} + C(23) * \text{LOG(INV)} + C(24) * \text{LOG(INF)} + \varepsilon_1$$

Berdasarkan persamaan tersebut hasil output eviews dengan model *Two-Stage Least Square*, sebagai berikut :

$$\text{LOG (PDB)} = 9.988 - 0.045 * \text{Log(TAX)} + 0.379 * \text{Log(GOV)} + 0.010 * \text{Log(INV)} - 0.057 * \text{LOG(INF)} + \varepsilon_1$$

a. Koefisien dalam elastisitas TAX terhadap PDB

Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa koefisien regresi untuk pajak (TAX) negatif 0.045 mengandung arti bahwa peningkatan terhadap pajak sebesar 1 persen maka pertumbuhan ekonomi (PDB) akan menurun sebesar 0.045 persen. Nilai koefisien sebesar 0.045 dapat dihitung elastisitas TAX dengan formula sebagai berikut :

$$E \text{ TAX} = \frac{dPDB}{dTAX} \times \frac{TAX}{PDB} = 0.045 \times \frac{11.59118}{2275506}$$

$$= 0.045 \times 0.00$$

$$= 0 < 1 = \text{In Elastis}$$

Berdasarkan hasil koefisien regresi diketahui nilai **negatif dan in elastis**, yang mengandung arti bahwa setiap peningkatan TAX maka akan menghasilkan persentase penurunan terhadap PDB yang lebih kecil.

b. Koefisien dalam elastisitas GOV terhadap PDB

Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa koefisien regresi untuk pengeluaran pemerintah (GOV) positif 0.379 mengandung arti bahwa

peningkatan terhadap pengeluaran pemerintah sebesar 1 persen maka pertumbuhan ekonomi (PDB) akan mengalami peningkatan sebesar 0.379 persen. Nilai koefisien sebesar 0.379 dapat dihitung elastisitas GOV dengan formula sebagai berikut :

$$E_{GOV} = \frac{dPDB}{dGOV} \times \frac{GOV}{PDB} = 0.379 \times \frac{1243373}{2275506}$$

$$= 0.379 \times 0.546$$

$$= 0.206 < 1 = \text{In Elastis}$$

Berdasarkan hasil koefisien regresi diketahui nilai **positif dan in elastis**, yang mengandung arti bahwa setiap peningkatan GOV maka akan menghasilkan persentase penambahan terhadap PDB yang lebih kecil.

c. Koefisien dalam elastisitas INV terhadap PDB

Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa koefisien regresi untuk investasi (INV) positif 0.010 mengandung arti bahwa peningkatan terhadap investasi sebesar 1 persen maka pertumbuhan ekonomi (PDB) akan mengalami peningkatan sebesar 0.010 persen. Nilai koefisien sebesar 0.010 dapat dihitung elastisitas INV dengan formula sebagai berikut :

$$E_{INV} = \frac{dPDB}{dINV} \times \frac{INV}{PDB} = 0.010 \times \frac{87433.46}{2275506}$$

$$= 0.010 \times 0.03$$

$$= 0 < 1 = \text{In Elastis}$$

Berdasarkan hasil koefisien regresi diketahui nilai **positif dan in elastis**, yang mengandung arti bahwa setiap peningkatan INV maka akan menghasilkan persentase penambahan terhadap PDB yang lebih kecil.

d. Koefisien dalam elastisitas INF terhadap PDB

Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa koefisien regresi untuk inflasi (INF) negatif 0.057 mengandung arti bahwa peningkatan terhadap inflasi sebesar 1 persen maka pertumbuhan ekonomi (PDB) akan mengalami penurunan sebesar 0.057 persen. Nilai koefisien sebesar 0.057 dapat dihitung elastisitas INF dengan formula sebagai berikut :

$$E_{INF} = \frac{dPDB}{dINV} \times \frac{INF}{PDB} = 0.057 \times \frac{7.096471}{2275506}$$

$$= 0.057 \times 0$$

$$= 0 < 1 = \text{In Elastis}$$

Berdasarkan hasil koefisien regresi diketahui nilai **negatif dan in elastis**, yang mengandung arti bahwa setiap peningkatan INF maka akan menghasilkan persentase penurunan terhadap PDB yang lebih kecil.

▪ **Uji t**

Prob TAX = 0.44 > 0.05 = tidak signifikan

Prob GOV = 0.00 < 0.05 = signifikan

Prob INV = 0.55 > 0.05 = tidak signifikan

Prob INF = 0.01 < 0.05 = signifikan

Berdasarkan hasil estimasi diketahui bahwa 2 dari 4 variabel signifikan terhadap PDB, dan 2 variabel yang tidak signifikan terhadap PDB. Maka H_0 diterima.

Artinya : GOV dan INF berpengaruh signifikan terhadap PDB.

- **Uji R^2**

Berdasarkan hasil estimasi di atas dapat menunjukkan bahwa $R^2 = 0.992$ yang bermakna bahwa variabel pajak (TAX), pengeluaran pemerintah (GOV), investasi (INV) dan inflasi (INF) mampu menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi (PDB) sebesar 99.2% dan sisanya sebesar 0.8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model estimasi.

B. Pembahasan

1. Analisis Simultanitas SBI, JUB, KURS, INV dan PDB terhadap INF

Berdasarkan hasil analisis regresi diketahui bahwa suku bunga, jumlah uang beredar dan kurs berpengaruh positif dan elastis terhadap inflasi, sedangkan investasi dan pdb berpengaruh negative dan elastis terhadap inflasi. Setelah dilakukan perhitungan parsial menggunakan uji t, hasil penelitian menunjukkan bahwa suku bunga, jumlah uang beredar, kurs, investasi dan pdb tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi.

a. Pengaruh Suku Bunga Terhadap Inflasi

Berdasarkan hasil analisa data diketahui bahwa ternyata suku bunga berpengaruh positif dan elastis terhadap inflasi.

Hasil temuan studi sejalan dengan temuan dari Endri (2008) dan Adrian Sutawijaya (2012), dalam hasil penelitiannya bahwa tingkat bunga yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi. Kenaikan suku bunga SBI akan menurunkan inflasi. Penurunan inflasi ini disebabkan karena masyarakat lebih termotivasi menyimpan uangnya di bank baik dalam bentuk deposito maupun dalam bentuk tabungan karena mengharapkan pengembalian yang menguntungkan. Oleh karena itu peningkatan suku bunga SBI akan diikuti oleh berkurangnya jumlah uang beredar. Hal ini akan menyebabkan terjadinya penurunan dalam permintaan barang dan jasa yang disebabkan oleh keengganan masyarakat untuk membeli barang dan jasa tersebut karena menyimpan uang di bank lebih menguntungkan daripada membelanjakan uang tersebut. Selanjutnya, penurunan permintaan barang dan jasa

akan memicu penurunan harga sehingga akan menurunkan inflasi. Dengan demikian penelitian ini telah sejalan dengan hipotesis yang menyatakan bahwa suku bunga berpengaruh positif terhadap inflasi. Artinya semakin tinggi tingkat bunga maka semakin semakin tinggi tingkat inflasi, atau sebaliknya. Hal ini sejalan dengan efek Fisher, bahwa ada hubungan satu untuk satu antara inflasi dan tingkat bunga, dan ini telah dibuktikan dalam perekonomian Amerika Serikat selama empat puluh tahun terakhir yang menunjukkan apabila inflasi tinggi maka tingkat bunga juga tinggi, dan ketika inflasi rendah maka tingkat bunga juga rendah (Mankiw: 2000). Disamping itu, karena tingkat bunga merupakan refleksi dari tingkat inflasi, maka ketika tingkat bunga tinggi maka akan mengurangi keagairahan penanam modal untuk mengembangkan sektor-sektor yang produktif. Franco Modigliani menyatakan bahwa opportunity cost memegang uang salah satunya dapat diukur dengan suku bunga atau inflasi. Menurut Baroroh dalam Hudaya (2011:28), hubungan antara suku bunga SBI dengan inflasi adalah kenaikan suku bunga SBI akan mendorong kenaikan suku bunga jangka pendek di pasar uang. Demikian juga halnya dengan suku bunga jangka panjang, produsen akan merespon kenaikan suku bunga di pasar uang dengan mengurangi investasinya, maka produksi dalam negeri (output) menurun sehingga tingkat inflasi domestik menurun.

b. Pengaruh Jumlah Uang Beredar Terhadap Inflasi

Berdasarkan hasil analisa data diketahui bahwa ternyata jumlah uang beredar berpengaruh positif dan elastis terhadap inflasi.

Penelitian ini tidak sesuai dengan pendapat dari Nugroho (2012) yang menjelaskan bahwa variabel dari jumlah uang beredar (M2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi. Namun, hasil temuan studi sejalan dengan temuan dari Adrian Sutawijaya (2012), dalam penelitiannya ia menyatakan bahwa jumlah uang beredar dimasyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi. Selanjutnya hasil temuan ini juga tidak sejalan dengan hasil penelitian dari Fery magaline (2006) Pengaruh tingkat suku bunga SBI dan jumlah uang beredar terhadap tingkat inflasi di Indonesia bahwa Jumlah uang beredar berpengaruh positif dan signifikan terhadap Inflasi di Indonesia. Menurut Mankiw (2006,:81), negara – negara yang memiliki pertumbuhan uang yang tinggi cenderung memiliki inflasi yang tinggi sedangkan Negara yang memiliki pertumbuhan uang yang rendah cenderung memiliki inflasi yang rendah. Hal tersebut sesuai dengan teori kuantitas bahwa kenaikan dalam tingkat pertumbuhan uang satu persen menyebabkan kenaikan satu persen tingkat inflasi.

c. Pengaruh Kurs Terhadap Inflasi

Berdasarkan hasil analisa data diketahui bahwa ternyata kurs berpengaruh positif dan elastis terhadap inflasi.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat inflasi di Indonesia maka akan mengakibatkan nilai tukar Rupiah mengalami depresiasi terhadap Dollar AS yang sesuai juga dengan penelitian Rusdiana (2011), Handoko (2010), dan Widiastuti (2011) bahwa inflasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai tukar. Tingginya angka inflasi yang terjadi pada tahun 2005, karena

dipicu oleh harga minyak dunia yang melambung tinggi sehingga harga BBM dalam negeri juga mengalami kenaikan, merupakan salah satu contoh yang menyebabkan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS mengalami depresiasi. Teori purchasing power parity (PPP) menyatakan bahwa perubahan nilai tukar akan menyesuaikan dengan besaran perbedaan tingkat inflasi di antara dua negara karena pola perdagangan internasional dan nilai tukar akan berubah sesuai dengan inflasi pada negara tersebut. Laju inflasi domestik yang lebih besar dibandingkan laju inflasi luar negeri dapat mengakibatkan nilai tukar domestik terdepresiasi. Hal ini akan menyebabkan harga barang-barang dan jasa-jasa domestik mengalami peningkatan, sehingga dapat memicu daya beli konsumen terhadap produk-produk dalam negeri akan sama ketika membeli produk-produk luar negeri. Berdasarkan teori PPP tersebut, dapat diketahui bahwa tingginya tingkat inflasi akan menyebabkan melemahnya pula nilai tukar mata uang.

d. Pengaruh Investasi Terhadap Inflasi

Berdasarkan hasil analisa data diketahui bahwa ternyata investasi berpengaruh negatif dan elastis terhadap inflasi.

Inflasi mempengaruhi investasi secara signifikan dan negatif di Indonesia. Terdapatnya pengaruh yang signifikan antara inflasi terhadap investasi yang mengindikasikan bahwasanya investasi dipengaruhi oleh inflasi. Apabila inflasi, mengalami peningkatan maka investasi di Indonesia akan mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan inflasi yang meningkat mengindikasikan adanya ketidakstabilan harga. Ketidakstabilan (return if investment), karena suku bunga adalah biaya yang

harus dikeluarkan dalam berinvestasi. Sedangkan sebaliknya, apabila inflasi mengalami penurunan mengindikasikan bahwa harga-harga dapat dikendalikan dengan baik atau terciptanya kestabilan harga. Kondisi ini akan berdampak terhadap penurunan suku bunga sehingga akan meningkatkan pengembalian investasi. Oleh karena itu, penurunan inflasi akan meningkatkan investasi. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori ekspansi permintaan agregat kasus klasik (Dornbusch:2008) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang negatif antara inflasi dengan investasi yang artinya kenaikan inflasi akan menurunkan investasi. Sedangkan pada teori ekspansi permintaan agregat kasus klasik, menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara inflasi dengan investasi yang mengartikan kenaikan inflasi akan mendorong aggregate demand. Dimana salah satu komponennya adalah investasi.

e. Pengaruh Pdb Terhadap Inflasi

Berdasarkan hasil analisa data diketahui bahwa ternyata investasi berpengaruh negatif dan elastis terhadap inflasi.

Hasil penelitian menjelaskan inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini memberikan bukti bahwa semakin meningkat inflasi akan menurunkan laju pertumbuhan ekonomi, ini karena dengan peningkatan laju inflasi yang dapat menyebabkan kurangnya investasi di suatu negara, mendorong kenaikan suku bunga serta penanaman modal yang bersifat spekulatif, kegagalan pelaksanaan pembangunan, ketidakstabilan ekonomi, defisit neraca pembayaran dan merosotnya tingkat kesejahteraan dan kehidupan masyarakat, yang pada akhirnya akan berimbas pada menurunnya pertumbuhan ekonomi. Adanya pengaruh dari

inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu apabila inflasi terlalu rendah, maka terjadi pada penekanan terhadap pertumbuhan ekonomi dan apabila inflasi terlalu tinggi, maka akan membuat daya beli masyarakat turun mengakibatkan perekonomian tidak berjalan. Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Susanto dan Rahmawati (2013) inflasi yang terjadi masih dalam tingkatan ringan sehingga kenaikan inflasi masih akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Kenaikan tingkat inflasi yang masih dalam tingkatan ringan bisa memberikan stimulus pada produsen untuk meningkatkan produksinya. Sesuai dengan hukum penawaran jika tingkat harga naik maka penawaran akan naik, hal inilah yang membuat produsen meningkat hasil produksinya. Ketika barang yang telah diproduksi pada masyarakat meningkat dan harga masih terjangkau oleh konsumen karena tingkat inflasi masih dalam tingkatan rendah maka daya beli konsumen tidak menurun sehingga hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi walaupun tingkat inflasi meningkat. Ditha Rima Kurniasari (2011), menyatakan bahwa hasil analisis inflasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya ketika inflasi meningkat maka pertumbuhan ekonomi tetap tinggi

2. Analisis Simultanitas TAX, GOV, INV dan INF terhadap PDB

Berdasarkan hasil analisis regresi diketahui bahwa pengeluaran pemerintah dan investasi berpengaruh positif dan in elastis terhadap PDB, sedangkan penerimaan pajak dan inflasi berpengaruh negative dan in elastis terhadap PDB. Setelah dilakukan perhitungan parsial menggunakan uji t, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap inflasi.

a. Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap PDB

Berdasarkan hasil analisa data diketahui bahwa ternyata penerimaan pajak berpengaruh negatif dan in elastis terhadap PDB.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Masrofi (2004) menunjukkan hasil pdrb, jumlah penduduk mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah. Penambahan pungutan pajak akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi jika nilai konsumsi, investasi, dan neto ekspor minimal tetap. Pajak akan menurunkan konsumsi, dilain pihak pajak menaikkan pendapatan pemerintah. Karena nilai uang yang dikeluarkan dari rumah tangga maupun masyarakat untuk pajak adalah sama dengan pendapatan pemerintah dari pajak, maka nilai pengeluaran pemerintah yang bersumber dari pajak paling besar sama atau lebih kecil dari nilai pajak itu sendiri. Alesina dan Ardagna (2010) menerangkan bahwa korelasi perpajakan cenderung lebih besar mempengaruhi output nasional dibandingkan dengan menaikkan belanja Negara. Sedangkan menurut Abustan dan Mahyudin (2009) mengevaluasi keterkaitan hubungan sebab akibat antara belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Makasar. Dalam penelitian menemukan bahwa APBD ditentukan oleh besarnya PDRB Makasar tidak sebaliknya. Dalam hal ini kinerja belanja pemerintah tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Ini berarti penelitian tidak sesuai dengan teori Keynesian.

b. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDB

Berdasarkan hasil analisa data diketahui bahwa ternyata pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan in elastis terhadap PDB.

Hal ini berlawanan dengan teori Keynes yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah yang mempengaruhi ekonomi ($G \Rightarrow Y$). Wagner menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomilah yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah ($Y \Rightarrow G$). Wagner menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomilah yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah ($Y \Rightarrow G$). Jelasnya, dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relative pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Ada Lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat yaitu tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, perkembangan demokrasi dan ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintahan.

c. Pengaruh Investasi Terhadap PDB

Berdasarkan hasil analisa data diketahui bahwa ternyata pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan in elastis terhadap PDB.

Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap investasi di Indonesia, terdapat pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan investasi mengindikasikan bahwasanya investasi dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Keadaan ini disebabkan karena terjadinya kenaikan pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada kenaikan investasi karena pertumbuhan ekonomi yang meningkat mengartikan bahwa perekonomian di dalam negara tersebut telah tumbuh dan berekspansi sehingga hal ini merupakan suatu peluang yang baik melakukan investasi. Dengan demikian investasi akan mengalami peningkatan. Begitu

sebaliknya, penurunan pertumbuhan ekonomi mengindikasikan pereconomian di dalam negara tersebut tidak memberikan suatu peluang yang baik untuk melakukan investasi sehingga akan mendorong investor untuk tidak berinvestasi. Oleh karena itu, investasi akan mengalami penurunan. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori akselator (Nanga: 2005) yang menyatakan bahwa terjadinya peningkatan output (PDB) akan meningkatkan investasi. Peningkatan PDB mengakibatkan terjadinya peningkatan pada investasi, karena output yang meningkat menunjukkan adanya gairah dalam perekonomian sehingga investasi akan lebih baik.

d. Pengaruh Inflasi Terhadap PDB

Berdasarkan hasil analisa data diketahui bahwa ternyata Inflasi berpengaruh negatif dan in elastis terhadap PDB.

Pengaruh negatif inflasi terhadap PDB sesuai dengan penelitian Larasati (2018) yang menyatakan bahwa inflasi mempunyai dampak negatif terhadap PDB yang artinya kenaikan inflasi akan menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Hasil ini juga sesuai dengan penelitian Pratiwi (2015) yang menyatakan bahwa inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Utari juga menyatakan bahwasannya inflasi yang tinggi dalam jangka panjang akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan apabila inflasi tinggi maka daya beli masyarakat akan menurun, menurunnya daya beli masyarakat akan mengakibatkan permintaan terhadap barang berkurang, berkurangnya permintaan terhadap barang mengakibatkan tingkat atau faktor produksi terpaksa dikurangi, salah satunya tenaga kerja, maka dengan begitu terjadilah pengangguran dan menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan dari interpretasi 2SLS (*Two Stages Least Square*) untuk persamaan 1 bahwa suku bunga, jumlah uang beredar dan kurs berpengaruh positif dan elastis terhadap inflasi, sedangkan investasi dan pdb berpengaruh negative dan elastis terhadap inflasi.
2. Berdasarkan dari interpretasi 2SLS (*Two Stages Least Square*) untuk persamaan 2 bahwa pengeluaran pemerintah dan investasi berpengaruh positif dan in elastis terhadap PDB, sedangkan penerimaan pajak dan inflasi berpengaruh negative dan in elastis terhadap PDB.
3. Berdasarkan hasil estimasi di atas dapat menunjukkan bahwa $R^2 = 0.6243$ yang bermakna bahwa variable suku bunga (SBI), jumlah uang beredar (JUB) , nilai tukar (KURS) , investasi (INV) dan pertumbuhan ekonomi (PDB) mampu menjelaskan variasi inflasi (INF) sebesar 62.43% dan sisanya sebesar 37.57% dijelaskan oleh variable lain yang tidak dimasukkan dalam modal estimasi.
4. Berdasarkan hasil estimasi di atas dapat menunjukkan bahwa $R^2 = 0.992$ yang bermakna bahwa variable pajak (TAX), pengeluaran pemerintah (GOV), investasi (INV) dan inflasi (INF) mampu menjelaskan variasi pertumbuhan

ekonomi (PDB) sebesar 99.2% dan sisanya sebesar 0.8% dijelaskan oleh variable lain yang tidak dimasukkan dalam modaln estimasi.

B. Saran

1. Pemerintah dan Bank Indonesia harus meminimalisir guncangan yang terjadi pada job dan inflasi agar tidak terjadi ketimpangan yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
2. Tingkat suku bunga SBI mempunyai kontribusi terhadap kenaikan inflasi, karena itu otoritas moneter harus menjaga agar tingkat bunga tidak terlalu tinggi yang akan meningkatkan inflasi. Oleh karena itu dalam menentukan kebijakan-kebijakan untuk menstabilkan suku bunga agar tetap stabil sebaiknya disertai dengan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.
3. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa depresiasinya nilai tukar rupiah dapat berdampak terhadap perekonomian. Jadi diharapkan kepada pemerintah agar nilai tukar rupiah tetap stabil. Karena nilai tukar rupiah sangat mempengaruhi variabel perekonomian lain.
4. Pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, karena pengeluaran rutin tidak secara langsung berhubungan dengan aktivitas perekonomian, demikian juga pengeluaran pembangunan yang pada umumnya untuk pembangunan sarana dan prasarana sehingga dampaknya tidak secara langsung dirasakan pada tahun pembangunannya. Sehubungan dengan hal tersebut kepada pemerintah disarankan agar melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengeluaran rutin

serta meningkatkan jumlah pengeluaran khususnya untuk pembangunan pada tahun-tahun yang akan datang dengan prinsip akuntabilitas dan tepat sasaran (efektif).

5. Diharapkan bagi Bank Indonesia dan Pemerintah lebih dapat memperhatikan perubahan yang terjadi dari setiap variable, agar tidak terjadi perubahan yang terlalu drastis yang berdampak pada variable lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspan, h., e.s. Wahyuni, s. Effendy, s. Bahri, m.f. Rambe, dan f.b. Saksono. (2019). "the moderating effect of personality on organizational citizenship behavior: the case of university lecturers". *International journal of recent technology and engineering (ijrte)*, volume 8 no. 2s, pp. 412-416.
- Aspan, h. (2017). "good corporate governance principles in the management of limited liability company. *International journal of law reconstruction*, volume 1 no. 1, pp. 87-100.
- Aspan, h. (2017). "peranan polri dalam penegakan hukum ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum". *Prosiding seminar nasional menata legislasi demi pembangunan hukum nasional*, isbn 9786027480360, pp. 71-82.
- Aspan, h. (2014). "konstruksi hukum prinsip good governance dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik". *Jurnal dialogia iuridica universitas maranatha bandung*, volume 2 no. 2, pp. 57-64.
- Aspan, h., i. M. Sipayung, a. P. Muharrami, and h. M. Ritonga. (2017). "the effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city)". *International journal of global sustainability*, issn 1937-7924, vol. 1, no. 1, pp. 55-66.
- Aspan, h., f. Milanie, and m. Khaddafi. (2015). "swot analysis of the regional development strategy city field services for clean water needs". *International journal of academic research in business and social sciences*, vol. 5, no. 12, pp. 385-397.
- Andrianus, F., & Niko, A. (2006). *Analisa Faktor-faktor yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia Periode 1997:3 : 2005:2. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 11(2)*.
- Asnawi, & Fitria, H. (2018). *Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Tingkat Suku Bunga Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. VII(01)*.
- Basri, Faisal. 2002, *"Perekonomian Indonesia"*, Erlangga, Jakarta
- Baasir, F. (2003). *Pembangunan dan Crisis*. Jakarta: Pustaka Harapan.
- Boediono. 1982. *Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada.
- Boediono. 2004. "Kebijakan Fiskal : Sekarang dan Selanjutnya," dalam Heru Subiyanto dan Singgih Riphahat". *Kebijakan Fiskal : Pemikiran, Konsep. dan Implementasi, Kompas*.

- Endri (2008) "*Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di Indonesia tahun 1997 - 2005.*
- Fery magaline (2006). Melakukan penelitian mengenai "*Pengaruh tingkat suku bunga SBI dan jumlah uang beredar terhadap tingkat inflasi di Indonesia tahun 1995 - 2004.*
- Fisher Irving, *The Purchasing Power oh Money*,1911 .
- Froyen, Richard T, 2002. *Macroeconomics : Theories and Policies, seventh edition, Prentice Hall.*
- Goeltom. (1999). *Dampak Kebijakan Moneter terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.*
- Jaka Sriyana. 2005. Ketahanan Fiskal : Studi Kasus Malaysia dan Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol.10. No. 2, hal: 123-132. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.*
- Lutfi, M., & Hidayat, A. (n.d.). Analisis Faktor-Faktor Jumlah Uang Beredar, Kurs dan Pengeluaran Pemerintah yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia.
- Madjid, Noor Choliz (2012), "*Kebijakan Fiskal dan Penyusunan APBN*" Direktorat Jenderal Anggaran, Jakarta : Depkeu RI
- Mankiw, N.Gregory. 2000. *Teori Makro Ekonomi. Ed 4 Terjemahan : Imam Nurmawan. Jakarta: Erlangga.*
- Mankiw, N.Gregory. (2003). *Teori Makro Ekonomi, Edisi Kelima.* Jakarta: Erlangga
- Mankiw, N. Gregory. (2006). *Makro Ekonomi, Terjemahan: Fitria Liza, Imam Nurmawan, Jakarta: Penerbit Erlangga.*
- Mankiw, N.Gregory. (2007). *MAKROEKONOMI.* Jakarta: Erlangga
- Maryati. (2010). Pengaruh Faktor Faktor Moneter Terhadap Inflasi Di Indonesia.
- Masrofi, Muhammad. 2004. *Potensi dan Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Semarang.*
- McEarhern, W. (2000). *Ekonomi Makro.* Jakarta: Salemba Empat.
- Misbahuddin. (2013). Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Inflasi Di Indonesia. 456 - 466.
- Mishkin,F.S,2004.The Economics of Money, Banking and Financial Markets.Seventh Edition. Internasional Edition,New York:Pearson Addison Wesley Liongman.

- Mishkin, Frederic S. 2009. *Ekonomi Uang , Perbankan, dan Pasar Uang Keuangan Buku 2*. Terjemahan Lana Soelistianingsih dan Beta Yulianita. Salemba Empat. Jakarta.
- Musgrave, Richard A., and Musgrave, Peggy B. 1998. *Public Finance in Theory and Practice*, 5th Edition. USA. McGraw-Hill Inc.
- Nizar, Muhammad Afdi (2010): "Arah Kebijakan Fiskal Di Indonesia" Universitas Indonesia, Indonesia.
- Nopirin. (1996). *Ekonomi Internasional*; Edisi ketiga. BPFE, Yogyakarta.
- Nopirin, *Ekonomi Moneter Buku I Edisi 4*, 1998, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Rusiadi, e. a. (2013). *Metode Penelitian Manajemen Akutansi Dan Ekonomi Pembangunan, Konsep, Kasus Dan Aplikasi SPSS, Eviews, Amos Dan Lisrel*. Medan: USU Press.
- Samuelson , P., & William , D. (2004). *Ilmu Makro Ekonomi*. Jakarta: Media Global Edukasi.
- Siwu, H., Masinambow, V., & Langi, M. T. (2014). Analisis Pengaruh Suku Bunga BI, Jumlah Uang Beredar, dan Tingkat Kurs Terhadap Tingkat Inflasi Di Indonesia. *Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14(2), 44-58.
- Sukirno, Sadono. 2003. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. Penerbit PT. Salemba, Jakarta
- Sukirno, S. (2006). *Teori Pengantar Makro Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susanti, H., Moh. Ikhsan, & Widyanto. (2000). *Indikator-indikator Makro Ekonomi* (2 ed.). Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Sutawijaya, A. (2012). Pengaruh Faktor - Faktor Ekonomi terhadap Inflasi di Indonesia. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 8.
- Setiawan, a. (2019). *Analisis pengukuran nilai overall equipment effectiveness (oe) pada mesin press batu bata (studi kasus pada unit usaha mesin press muhammad kuwat)* (doctoral dissertation, universitas muhammadiyah Palembang).
- Setiawan, a., hasibuan, h. A., siahaan, a. P. U., indrawan, m. I., rusiadi, i. F., wakhayuni, e., ... & rahayu, s. (2018). Dimensions of cultural intelligence and technology skills on employee performance. *Int. J. Civ. Eng. Technology*, 9(10), 50-60.
- Setiawan, a. (2018). Pengaruh promosi jabatan dan lingkungan kerja terhadap semangat kerja pegawai di lingkungan universitas pembangunan panca budi medan. *Jurnal akuntansi bisnis dan publik*, 8(2), 191-203

Taylor, J.B.1995. The Monetary Transmission Mechanism : An.Empirical Framework. Journal of Economic Perspective. Vol.09. Number.04.pp.11-26

Tulus Tambunan. 2006. *Kondisi Infrastruktur Di Indonesia*. Jakarta : Kadin Indonesia-Jetro.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Warjiyo,Solikin. (2004). *Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia*. Buku Seri Kebanksentralan.No 11. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.

www.bps.go.id

www.worldbank.com